



RANKHIR RENJA BADAN KESBANGPOL KAB. KUTAI KARTANEGARA

**RANKHIR RENJA
2026**





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Awang. Sabran Bc.Hk No.63 Telp.(0541) 661518, Fax.(0541) 662602

TENGGARONG 75514

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : SK-06/BKBP/SET-II/800/01/2025

TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026, perlu dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, maka dipandang perlu dibentuk tim penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. bahwa untuk maksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur dalam Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026. Dengan susunan Personil Tim seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Sebagaimana Tersebut Pada Diktum Pertama adalah :

1. Menyiapkan bahan/data dari bidang guna mendukung kegiatan penyusunan Renja Perangkat Daerah;
2. Menyiapkan dan merumuskan program renja;
3. Mengadakan Rapat Tim untuk penyusunan Renja;
4. Menyusun Laporan Hasil Rapat;
5. Membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah;
6. Melaporkan hasil penyusunan Renja kepada Bupati Kutai Kartanegara melalui Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim harus senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPA – SKPD Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 20 Januari 2025

Kepala Badan,

RINDA DESIANTI, S.Sos., M.Si
Nip. 19691226 200112 2 002

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor : SK-06/BKBP/SET-II/800/01/2025

Tanggal : 20 Januari 2025

Tentang : Tim Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2026.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Kepala Badan	Pengarah	
2	Sekretaris	Penanggung Jawab	
3	Perencana Ahli Muda	Ketua	
4	Kasub.Bag. Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	
5	Kabid. Ket. Ekososbud	Anggota	
6	Kabid. Idiologi dan Wasbang	Anggota	
7	Kabid. Politik Dalam Negeri	Anggota	
8	Analisis Kebijakan (Sub Ketahanan Sosbud)	Anggota	
9	Analisis Kebijakan (Sub Idiologi dan Kewaspadaan)	Anggota	
10	Analisis Kebijakan (Sub Fasilitas Ormas)	Anggota	
11	Darmadian Nur	Anggota	
12	Irhamni,S.IP	Anggota	
13	Zaini Ma'ruf	Anggota	
14	Juminah.HR	Anggota	
15	Yeni	Anggota	

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 20 Januari 2025

Kepala Badan,

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si
Nip. 19691226 200112 2 002

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja tahun 2026 menjabarkan target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan kegiatan. Target kinerja ini merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan hingga sub kegiatan, dan merupakan alat pengukur keberhasilan setiap akhir periode pelaksanaan sehingga merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus akuntabilitas kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis yang diakhiri dengan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Selain itu, Rencana Kerja merupakan suatu jembatan yang menghubungkan antara rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja dengan sistem penganggaran, memberikan gambaran mengenai sasaran dan strategi pencapaiannya, memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rencana kerja kegiatan yang disusun dilengkapi dengan indikator-indikator capaian kinerja yang dituangkan secara sistematis dengan alur yang jelas untuk menggambarkan cara pencapaian sasaran berupa *input*, *output*, dan *outcome* dengan harapan kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur capaian kinerjanya.

Rencana Kerja 2026 merupakan gambaran mendetail cara pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2026 untuk mewujudkan tujuan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara. Komitmen ini hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan kinerja seluruh staf Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara yang optimal dan terorganisasi.

DAFTAR ISI

Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara	i
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	82
2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD	99
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	102
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	103
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	87
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	106
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	110
4.1 Program dan Kegiatan	110
BAB V PENUTUP	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional diarahkan untuk mengembangkan antara kota dan desa, antar sektor mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, ideologi dan situasi kondusif daerah yang sangat prioritas dalam pembangunan dewasa ini.

Dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan dari semua unsur tersebut, maka penyelenggaraan kesatuan bangsa dan politik perlu mengambil langkah-langkah guna membantu Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan menyiapkan strategi dan kebijakan.

Untuk itu diperlukan suatu perencanaan kerja berdasarkan analisis terhadap permasalahan diatas pada tahun 2026 yang akan datang, berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah pada pelaksanaan pembangunan tahun kedua RPJMD 2025-2029.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu proses mempersiapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan organisasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam proses perencanaan kerja tahunan tentunya tidak terlepas dari rencana strategis yang telah dibuat sebagai acuan kerja dalam 5 (lima) tahun ke depan dan pada tahun 2026 sebagaimana renstra yang ada akan lebih fokus kepada pemeliharaan situasi kondusif di dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024, Pelaksanaan tugas Paskibraka, Pembinaan Wawasan Kebangsaan, Penguatan Forum-Forum Bentukan Pemerintah, Fasilitasi Pelaksanaan P4GN serta mendukung pembangunan Ibu Kota Negara.

Sebagai langkah awal, diperlukan upaya penyempurnaan matriks struktur program dan kegiatan melalui penetapan indikator kinerja. Hasil dari penyusunan ini akan diimplementasikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dengan tema pembangunan **“Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan”** dengan prioritas dan focus pembangunan sebagai berikut :

1. Peningkatan Pemenuhan dan Pemerataan Kualitas Layanan Kesehatan
 - Penyediaan SDM Tenaga Kesehatan dan Integrasi dukungan kebijakan terhadap pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis
2. Peningkatan Pemenuhan dan Pemerataan Kualitas Layanan Pendidikan
 - Keterpaduan layanan pendidikan dalam menjamin keberlanjutan pendidikan dasar (SD-SMP) hingga ke pendidikan menengah dan tinggi
3. Pengembangan dan Penguatan Kawasan Ekonomi Potensial yang Terintegrasi dan Berkelanjutan
 - Membangun kelembagaan dan sumber daya manusia yang kuat berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah berbasis pendampingan dan kemitraan
4. Penguatan Regulasi dan Tata Kelola yang Adaptif, Konsisten dan Implementatif
 - Penguatan pengawasan, perbaikan regulasi dan kelembagaan organisasi perangkat daerah dalam mengawal pelaksanaan arah kebijakan pembangunan yang terstruktur dan sistematis
5. Penguatan Infrastruktur dan Penerapan Digitalisasi Pelayanan Publik
 - Peningkatan kualitas jaringan internet dan fasilitasi layanan data dan informasi serta perizinan hingga ke kecamatan/desa/ kelurahan
6. Penguatan Nilai-Nilai Tradisional serta Warisan Budaya melalui Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Sejak Dini

- Pengembangan kapasitas lembaga pelestarian budaya dan membangun kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi serta masyarakat penggiat budaya dalam satu kesatuan skema kerja yang terintegrasi
7. Penguatan Kecamatan sebagai Pusat Pertumbuhan dan Pengembangan Infrastruktur Desa yang Berkualitas
- Penyediaan RDTR wilayah Kecamatan dan Tata Ruang Desa, pengembangan perumahan rakyat yang terjangkau dan optimalisasi pelimpahan kewenangan kecamatan dan dana transfer ke Desa
8. Pembangunan Prasarana dan Sarana Konektivitas (keterkaitan wilayah)
- Penyediaan Integrasi layanan transportasi perhubungan darat maupun air yang aman, berkualitas dan berkelanjutan

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renja Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Tentang Ormas;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 - 2024;
16. Peraturan Bersama Mendagri dan Menag No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang kerukunan umat beragama;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini di daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 - 2026;

27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dimaksudkan untuk meletakkan landasan bagi sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu menjamin arah pembangunan dan memiliki akuntabilitas kinerja yang terukur pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026, adalah sebagai berikut :

1. Mempersiapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026;
2. Meletakkan prinsip dasar dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara secara terkoordinasi, terpadu dan tepat waktu serta sasaran yang diinginkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja PD

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Laludan Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD, Dampaknya terhadap visi dan misi Kepala Daerah, Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2025.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan,, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.

BAB III. TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB V. PENUTUP

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sebagaimana disebutkan dalam Renstra Badan Kesbangpol 2025-2029, pada tahun 2026, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis yang dijabarkan dalam 2 (dua) Indikator Kinerja Utama.

Badan Kesbangpol bertugas menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri untuk membantu Bupati menyelenggarakan Pemerintahan Daerah. Terkait dengan hal tersebut, selama 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMD 2025 – 2029, Badan Kesbangpol telah melaksanakan berbagai program dukungan terhadap pembangunan daerah meliputi penanganan konflik, melakukan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dan pancasila, peningkatan partisipasi politik masyarakat, pengaturan database ormas dan parpol. Berikut tabel capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2024 :

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI 2024	% PENC.	KETERANGAN
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	63,75	42,83	67,18%	Hasil Penilaian Mandiri, sambil hasil penilaian dari inspektorat
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	24	14	58,33%	merupakan angka capaian penurunan jumlah konflik dan gejolak
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	3,33	5,22	156,76%	Kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparaturnya telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah peserta dan tingkat pemahaman yang sangat baik dan jumlah peserta melebihi dari target renstra

Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah	Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	5,53	6,84	123,69%	Kegiatan Pendidikan Politik dilaksanakan di seluruh kecamatan terdiri dari Perempuan, Pelajar dan Masyarakat dengan jumlah peserta melebihi dari target renstra
---	---	------	------	---------	---

PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA PROGRAM TAHUN 2024

PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	REALISASI 2024	% PENC.	KETERANGAN
Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %	100%	100%	Data dasar Jumlah Konflik dan gejala masyarakat dan kejadian konflik pada tahun 2023 dapat diatasi, hal ini bisa diartikan bahwa keadaan situasi di Kutai Kartanegara kondusif
Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase aparat dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	1,99%	3,12%	157%	kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparat telah dilaksanakan dengan tingkat kehadiran peserta yang melebihi target
Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase aparat dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,33%	2,06%	155%	kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparat telah dilaksanakan dengan tingkat kehadiran peserta yang melebihi target.
Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,27 %	17,67 %	124%	kegiatan pendidikan politik telah dilaksanakan dengan tingkat kehadiran peserta yang melebihi target
Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang tertib administrasi	11,40%	11,1%	97,37%	Dari target 25 ormas telah terpenuhinya 21 ormas yang telah tertib administrasi dalam perpanjangan dan pendaftaran serta pelaporan
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 nilai	70,98 nilai	80,66%	Nilai SAKIP hasil revidi Tahun 2023

Secara keseluruhan, Badan Kesbangpol berhasil melaksanakan tugas, fungsi dan misi yang diembannya dalam pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol tahun 2024, dengan perhitungan bahwa terdapat 3 (tiga) indikator kinerja realisasinya melebihi target sasaran, dan 1 (satu) indikator kinerja yang realisasinya memenuhi target sasaran, dan terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang realisasinya tidak mencapai target.

Capaian kinerja Badan Kesbangpol secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil memenuhi target kinerja yang dijanjikan pada awal tahun, capaian pada tahun 2024 dan lebih baik dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2023

Dalam hal pencapaian output program dan kegiatan tahun anggaran 2024 dengan rincian realisasi kinerja sebesar 97,54 % dan realisasi keuangan sebesar 91,55 %, untuk selengkapnya terlampir dalam laporan ini

Secara keseluruhan pencapaian target renja dan renstra yang tercapai, tidak tercapai dan melebihi target serta faktor-faktor penyebab dan tindak lanjut terhadap capaian target program dan kegiatan pada tahun 2024, secara keseluruhan disampaikan sebagai berikut :

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2024				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
I	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai	88	70,98	80,66	Adanya perbaikan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya	Reviu terhadap SOP pengumpulan data kinerja
		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	100	Tertibnya Pengumpulan data kinerja dan pelaporan tepat waktu	Kepatuhan SOP
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	Tertibnya Pengumpulan data kinerja dan pelaporan tepat waktu	Kepatuhan SOP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	3	100	Tertibnya Pengumpulan data kinerja dan pelaporan tepat waktu	Kepatuhan SOP
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan	20	20	100	Tertibnya penatausahaan keuangan dan pelaporan	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	900	710	78,89	Terdapat ASN yang pensiun dan meninggal serta pindah tugas	Kepatuhan SOP
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	1	100	Tertibnya penatausahaan keuangan dan pelaporan	Kepatuhan SOP

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2024				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	18	18	100	Tertibnya penatausahaan keuangan dan pelaporan	Kepatuhan SOP
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dokumen	3	3	100	Tertibnya penatausahaan BMD dan pelaporan	Kepatuhan SOP
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	3	3	100	Tertibnya penatausahaan BMD dan pelaporan	Kepatuhan SOP
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dokumen	4	4	100	Tertibnya pelaporan data dan kepangkatan ASN Kesbangpol	Kepatuhan SOP
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	75	50	66,67	Jumlah peserta sosialisasi sesuai target	Kepatuhan SOP
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Layanan	6	6	100	Tertibnya pelaksanaan layanan	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	4	4	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket	29	29	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Paket	38	38	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket	6	6	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	600	600	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2.500	2.500	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	4	4	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	2	2	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	402	402	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	12	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2024				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	24	24	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Bulan	24	24	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	85	85	Kelengkapan administrasi barang yang masih belum lengkap	Proses pemenuhan kelengkapan administrasi barang
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	20	2	10,00	Sebagian kendaraan operasional masih dapat dioptimalkan	Diperlukan pencatatan masa operasional kendaraan secara berkala
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	45	9	20,00	Kelengkapan surat kendaraan untuk pengurusan belum ditemukan	Pengusulan kemudahan administrasi pada Samsat untuk kendaraan dinas
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Unit	43	25	58,14	Sebagian peralatan operasional masih dapat dioptimalkan	Diperlukan pencatatan masa operasional peralatan secara berkala
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Unit	3	3	100	Pelaksanaan sesuai target	Kepatuhan SOP
II	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Persen	1,99	3,12	156,78	Kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparaturnya telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah peserta dan tingkat pemahaman yang sangat baik	Melaksanakan Program Pendidikan Wawasan Kebangsaan melalui sosialisasi dan penyuluhan terhadap masyarakat dan tokoh agama serta melakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta bersama FPK dan FKUB
		Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang	Dok/Bln	12	12	100	Pelaksanaan dokumen	Kepatuhan SOP

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2024				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
		ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					pelaporan sesuai target	
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	3.500	3.500	100	Metode pelaksanaan dan materi yang disampaikan lebih fokus dan dapat dipahami dengan baik	Diperlukan inovasi setiap tahunnya agar tidak monoton dan lebih menyesuaikan dengan karakteristik peserta
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang	1.000	1.000	100	Metode pelaksanaan dan materi yang disampaikan lebih fokus dan dapat dipahami dengan baik	Diperlukan inovasi setiap tahunnya agar tidak monoton dan lebih menyesuaikan dengan karakteristik peserta
III	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persen	14,27	17,67	123,83	Kegiatan Pendidikan Politik dilaksanakan di seluruh kecamatan terdiri dari Perempuan, Pelajar dan Masyarakat dengan jumlah peserta melebihi dari target renstra	Melakukan kerjasama dengan partai politik dan lembaga pendidikan dalam peningkatan pendidikan politik kepada aparat dan masyarakat
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Dok/Bln	12	12	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta	Orang	32.848	32.848	100	Sikap apatis masyarakat terhadap dunia politik dan pendidikan politik belum menjangkau wilayah pedesaan	Diperlukan inovasi setiap tahunnya agar tidak monoton dan lebih menyesuaikan dengan karakteristik peserta serta

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2024				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
		Pemantauan Situasi Politik di Daerah						lokasi pelaksanaan bisa menjangkau daerah pedesaan dan pemukiman perusahaan
		Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	48	48	100	Parpol telah memenuhi kelengkapan administrasi dan telah menyelesaikan pertanggung jawaban	Peningkatan kapasitas dan pemahaman partai politik terhadap peningkatan pendidikan politik
		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan	500	500	100	Pelaksanaan monev telah dilaksanakan	Diperlukan upaya peningkatan analisis pelaporan perkembangan politik
IV	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persen	11,40	11,1	97,37	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku	Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang organisasi kemasyarakatan pada wilayah yang terdata banyak ormas
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Dokumen	20	20	100	Dokumen sesuai dengan jumlah dokumen ormas yang terregistrasi	Diperlukan peningkatan sosialisasi tentang pentingnya pelaporan keberadaan ormas
		Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	300	281	93,67	Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan	Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang organisasi

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan			Capaian Target Tahun 2024				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
				Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
								perundang-undangan yang berlaku	kemasyarakatan pada wilayah yang terdata banyak ormas
V	PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			Persen	1,33	2,06	154,89	Kegiatan pembinaan kepada masyarakat dan aparaturnya telah dilaksanakan seluruhnya dengan jumlah peserta dan tingkat pemahaman yang sangat baik	Melakukan Sosialisasi dan Penyuluhan serta Tes Urine terhadap ASN dan Masyarakat serta pembentukan Desa dan Sekolah Bersinar (Bersih Narkoba) di 11 Desa dan 2 Sekolah
		Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Dok/Tri	5	5	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
			Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	1.400	1.400	100	Sikap apatis masyarakat terhadap ketahanan ekososbud dan belum menjangkau wilayah pedesaan	Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga pendidikan dalam peningkatan pemahaman ketahanan ekososbud kepada aparaturnya dan masyarakat
			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan	22	22	100	Pelaksanaan monev telah dilaksanakan	Diperlukan upaya peningkatan analisis pelaporan ketahanan ekososbud
VI	PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			Persen	100	100	100	Terjalannya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam penanganan konflik dan peran forum-forum bentukan	Telah dilakukan upaya melalui pendidikan dan pelatihan dasar deteksi dini dan pelaporan serta monitoring deteksi dini terhadap dampak yang

No.	Uraian Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Capaian Target Tahun 2024				Faktor Penyebab Capaian	Tindak Lanjut
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian		
							pemerintah (FPK,FKUB dan FKDM)	akan timbul dari potensi kerawanan yang mengganggu situasi kondusifitas daerah serta penyusunan dokumen ketahanan ekonomi
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Dok/Bln	12	12	100	Pelaksanaan dokumen pelaporan sesuai target	Kepatuhan SOP
		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	1.000	1.000	100	Terjalannya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam penanganan konflik dan peran forum-forum bentukan pemerintah (FPK,FKUB dan FKDM)	Diperlukan analisis yang lebih detail terhadap hasil deteksi dini yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan selanjutnya
		Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	50	50	100	Terjalannya koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan dalam penanganan konflik dan peran forkopimda	Peningkatan jalin koordinasi antar instansi vertikal

Dalam tahun 2024 pencapaian program kegiatan sebagaimana yang telah disampaikan pada tabel diatas, tentunya memiliki implikasi terhadap target capaian pada rencana strategis Badan Kesbangpol, adapun implikasi yang timbul terhadap capaian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dari seluruh program hanya terdapat 1 program yang tidak mencapai target, sehingga akan menghambat pencapaian pada akhir renstra

2. Pada program lainnya capaian yang melebihi target akan dilakukan evaluasi lagi terkait perubahan atau penambahan target kinerja
3. Secara keseluruhan pada capaian renstra masih baik, karena masih berada pada tahun pertama dan pada tahun berikutnya akan dilakukan upaya pencapaian target
4. Diperlukan penyesuaian terhadap indikator dan satuan target

Dalam menghadapi capaian tersebut, tentunya terdapat permasalahan yang timbul di masyarakat yang harus diselesaikan dengan program dan kegiatan secara berkesinambungan dalam renstra kami yang dijabarkan ke dalam Renja

Dari penjabaran diatas, berikut kami sampaikan beberapa program dan kegiatan yang dilakukan penyesuaian terhadap Renja tahun 2024 :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Terdapat penyesuaian anggaran dan target kinerja pada kegiatan yang terdapat pada program ini, penyesuaian dilakukan untuk melakukan pergeseran anggaran kepada kegiatan lain dalam rangka memenuhi target kinerja.

2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Pada program ini dilakukan pergeseran dan penambahan pagu anggaran dalam sub kegiatan serta target kinerja dalam rangka memenuhi keperluan kegiatan Jejaring Panca Mandala dan pelaksanaan seleksi dan pusdiklat Paskibraka

3. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Pagu kegiatan ini mengalami pergeseran dan penambahan terkait untuk keperluan Fasilitas KPU dan Bawaslu dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan workshop teknis penyelenggaraan pemilu tingkat kecamatan tahapan pemilu 2024 dengan pelaksanaan pendidikan politik bagi masyarakat dan upaya untuk mensinergikan langkah Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas

kehidupan politik yang demokratis di Kabupaten Kutai Kartanegara serta hibah kepada penyelenggara Pemilu Kepala Daerah tahun 2024

4. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Pada program ini dilakukan pergeseran pagu anggaran dalam sub kegiatan serta target kinerja dalam rangka memenuhi keperluan kegiatan fasilitasi Bawaslu dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam pelaksanaan sosialisasi FKUB dan BAWASLU kabupaten kutai kartanegara menuju pemilu damai dan demokratis serta pembelian test kit narkoba.

5. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Pada program ini dilakukan penambahan pagu anggaran serta target kinerja untuk keperluan pelaksanaan hari bela negara 2024 dan Pelaksanaan peningkatan kapasitas Anggota FKDM kabupaten kutai kartanegara serta sosialisasi pencegahan radikalisme bersama MUI dan Kemenag

TABEL T-C.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2024
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) Tahun 2021 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN s/d TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024						TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD s/d TAHUN 2025				
							TARGET RENJA PD TAHUN 2024		REALISASI RENJA PD TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA		
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6x100		9		10 = 5+7+9		11 = 10/4x100	
			K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan	K	Satuan
8.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	90	Nilai	95,2	Nilai	87	Nilai	70,98	Nilai	81,59	persen	88	Nilai	70,98	Nilai	78,87	persen
8.01.01.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	dokumen	12	dokumen	6	dokumen	6	dokumen	100	persen	6	dokumen	24	dokumen	80	persen

8.01.0 1.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	dokumen	6	dokumen	3	dokumen	3	dokumen	100	persen	3	dokumen	12	dokumen	80	persen
8.01.0 1.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	laporan	6	laporan	3	laporan	3	laporan	100	persen	3	laporan	12	laporan	80	persen
8.01.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	100	laporan	40	laporan	20	laporan	20	laporan	100	persen	20	laporan	80	laporan	80	persen
8.01.0 1.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan	900	orang/bulan	900	orang/bulan	900	orang/bulan	710	orang/bulan	78,89	persen	900	orang/bulan	900	orang/bulan	100	persen
8.01.0 1.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	laporan	2	laporan	1	laporan	1	laporan	100	persen	1	laporan	4	laporan	80	persen
8.01.0 1.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	90	laporan	36	laporan	18	laporan	18	laporan	100	persen	18	laporan	72	laporan	80	persen

8.01.0 1.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	15	dokume n	6	dokume n	3	dokume n	3	dokume n	10 0	pe rse n	3	dokume n	12	dokume n	80	pe rse n
8.01.0 1.2.03. 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	15	laporan	6	laporan	3	laporan	3	laporan	10 0	pe rse n	3	laporan	12	laporan	80	pe rse n
8.01.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	20	dokume n	8	dokume n	4	dokume n	4	dokume n	10 0	pe rse n	4	dokume n	16	dokume n	80	pe rse n
8.01.0 1.2.05. 10	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	37 5	orang	10 0	orang	75	orang	50	orang	66 ,6 7	pe rse n	75	orang	22 5	orang	60	pe rse n
8.01.0 1.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	30	layanan	12	layanan	6	layanan	6	layanan	10 0	pe rse n	6	layanan	24	layanan	80, 00	pe rse n
8.01.0 1.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang disediakan	20	paket	9	paket	4	paket	4	paket	10 0	pe rse n	4	paket	17	paket	85	pe rse n
8.01.0 1.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	14 5	paket	62	paket	29	paket	29	paket	10 0	pe rse n	29	paket	12 0	paket	82, 758 62	pe rse n

8.01.0 1.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	15 2	paket	38	paket	38	paket	38	paket	10 0	pe rse n	38	paket	11 4	paket	75, 00	pe rse n
8.01.0 1.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	21	paket	13	paket	6	paket	6	paket	10 0	pe rse n	5	paket	24	paket	114 ,29	pe rse n
8.01.0 1.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	11 75	laporan	90 0	laporan	60 0	laporan	60 0	laporan	10 0, 00	pe rse n	60 0	laporan	21 00	laporan	178 ,72	pe rse n
8.01.0 1.2.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	11 94 0	dokume n	44 40	dokume n	25 00	dokume n	25 00	dokume n	10 0, 00	pe rse n	25 00	dokume n	94 40	dokume n	79, 06	pe rse n
8.01.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	10 0	persen	10 0	persen	10 0	persen	10 0	persen	10 0	pe rse n	10 0	persen	10 0	persen	100	pe rse n
8.01.0 1.2.07. 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah	37	unit	20 5	unit	17 0	unit	40 2	unit	23 6, 47	pe rse n	4	unit	61 1	unit	165 1,3 51	pe rse n
8.01.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	12	bulan	10 0	pe rse n	12	bulan	12	bulan	100	pe rse n

8.01.0 1.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	10 0	pe rse n	12	laporan	12	laporan	100	pe rse n
8.01.0 1.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	10 0	pe rse n	12	laporan	12	laporan	100	pe rse n
8.01.0 1.2.01. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	10 0	pe rse n	12	laporan	12	laporan	100	pe rse n
8.01.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	10 0	persen	10 0	persen	10 0	persen	10 0	persen	10 0	pe rse n	10 0	persen	10 0	persen	100	pe rse n
8.01.0 1.2.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	30	unit	26	unit	20	unit	2	unit	10 ,0 0	pe rse n	10	unit	30	unit	100	pe rse n
8.01.0 1.2.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, atau Lapangan	40	unit	26	unit	45	unit	9	unit	20 ,0 0	pe rse n	15	unit	40	unit	100	pe rse n

		Pajak dan Perizinan																
8.01.0 1.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	43	unit	38	unit	43	unit	25	unit	58,14	pe rse n	43	unit	43	unit	100	pe rse n
8.01.0 1.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	2	unit gedung	3	unit gedung	3	unit gedung	3	unit gedung	100	pe rse n	2	unit gedung	2	unit gedung	100	pe rse n
8.01.0 2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	2,34	Persen	2,19	Persen	1,99	Persen	3,12	Persen	156,78	pe rse n	2,17	Persen	3,12	Persen	133,33	pe rse n
8.01.0 2.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	60	dokume n/bulan	24	dokume n/bulan	12	dokume n/bulan	12	dokume n/bulan	100	pe rse n	12	dokume n/bulan	48	dokume n/bulan	80	pe rse n
8.01.0 2.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Pe nyuluhan	2550	orang	2550	orang	3500	orang	3500	orang	100,00	pe rse n	2000	orang	8050	orang	315,69	pe rse n

	Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
8.01.0 2.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan	20 00	orang	80 0	orang	10 00	orang	10 00	orang	10 0,00	pe rse n	70 0	orang	25 00	orang	125	pe rse n
8.01.0 3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14 ,7 5	Persen	14 ,7 6	Persen	14 ,2 7	Persen	17 ,6 7	Persen	12 3, 83	pe rse n	14 ,5 1	Persen	17 ,6 7	Persen	119 ,80	pe rse n

8.01.0 3.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	60	dokumen/bulan	24	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	100	persen	12	dokumen/bulan	48	dokumen/bulan	80	persen
8.01.0 3.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan	7020	orang	7021	orang	32848	orang	32848	orang	100	persen	1000	orang	40869	orang	582,18	persen

	Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah parpol yang difasilitasi terkait pembinaan, verifikasi, penyusunan dan monev bankeu parpol	16	orang	30	orang	48	orang	48	orang	100	persen	21	orang	30	orang	187,5	persen
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik daerah	270	Laporan	52	Laporan	500	Laporan	500	Laporan	100,00	persen	24	Laporan	576	Laporan	213,33	persen

	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang tertib administrasi	14,4	Persen	9,8	Persen	11,4	Persen	11,1	Persen	97,37	persen	12,9	Persen	11,1	Persen	77,08	persen
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	130	dokumen	38	dokumen	30	dokumen	27	dokumen	90,00	persen	30	dokumen	95	dokumen	73,08	persen
8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang difasilitasi	145	orang	38	orang	300	orang	281	orang	93,67	persen	840	orang	1159	orang	799,31	persen

8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,58	Persen	1,77	Persen	1,33	Persen	2,06	Persen	154,89	pe rse n	1,45	Persen	2,06	Persen	130,38	pe rse n
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	25	dokume n/triwul an	10	dokume n/triwul an	5	dokume n/triwul an	5	dokume n/triwul an	100	pe rse n	5	dokume n/triwul an	20	dokume n/triwul an	80	pe rse n
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Pe nyuluhan	3000	orang	3933	orang	1400	orang	1400	orang	100,00	pe rse n	1500	orang	6833	orang	227,77	pe rse n

8.01.0 5.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan pemantauan ketahanan ekososbud	98	laporan	44	laporan	22	laporan	22	laporan	100	persen	35	laporan	101	laporan	103,06	persen
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik dan Gejala Masyarakat yang ditindaklanjuti	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	persen	100	Persen	100	Persen	100	persen
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	60	dokumen/bulan	24	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	12	dokumen/bulan	100	persen	12	dokumen/bulan	48	dokumen/bulan	80	persen

8.01.0 6.2.01. 04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kewaspadaan dini dan penanganan konflik	15 50	orang	85 0	orang	10 00	orang	10 00	orang	10 0	pe rse n	80 0	orang	26 50	orang	170 ,97	pe rse n
8.01.0 6.2.01. 06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitasi forkopimda	25 0	dokume n	85	dokume n	50	dokume n	50	dokume n	10 0, 00	pe rse n	50	dokume n	18 5	dokume n	74, 00	pe rse n

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol tahun 2024 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol tahun 2024 dengan realisasinya. Berikut capaian kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2024 di setiap indikator kinerja :

Tujuan 1 :

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Badan Kesbangpol.

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis I sebagaimana diatas, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja. Gambaran dan analisis pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2022	2023	2024
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88	86,16	95,20	70,98

Dari indikator tersebut diatas, bahwa setiap tahun hasil capaian mengalami peningkatan, dimana hal ini disebabkan beberapa faktor salah satunya terkait dengan pelaksanaan perbaikan hasil evaluasi tahun sebelumnya, berikut analisis dari indikator tersebut :

a. Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian dan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Administrasi perkantoran merupakan salah satu bagian dari manajemen yang memberikan informasi layanan di bidang administrasi perkantoran yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan mampu memberikan dampak kelancaran pada operasional suatu OPD dan

memperlancar pekerjaan para aparatur di dalamnya. Secara keseluruhan pelayanan terhadap administrasi perkantoran sudah baik, namun dilihat dari capaian indikatornya tidak memenuhi target, hal ini disebabkan ada beberapa kegiatan yang tidak selesai karena disesuaikan pada keadaan dan kebutuhan pelayanan administrasi pada saat itu, secara detail dapat dijelaskan sebagai berikut :

URAIAN	TARGET	CAPAIAN	REALISASI
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29 jenis	29 jenis	100,00%
Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	45 unit	2 unit	20,00%
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	75 orang	50 orang	66,67%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43 unit	25 unit	58,14%

Selain dari uraian diatas, untuk uraian lain yang berhubungan dengan pelayanan administrasi perkantoran telah terlaksana dengan baik atau telah tercapai dari yang ditargetkan seperti ATK, Cetakan, makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi. Terkait tidak tercapainya target dari uraian diatas dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam hal pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor masih terdapat sisa perlengkapan yang tidak digunakan.
2. Dalam Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, terdapat 7 (tujuh) unit kendaraan yang BPKB masih dalam penelusuran.
3. Dalam Penataan Arsip Perangkat Daerah, terdapat 1 (satu) jenis barang yang tidak terealisasi.

Dengan adanya kendala tersebut maka capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2024 mengalami kenaikan, namun hal ini bukan menjadi faktor kegagalan karena belanja untuk kegiatan pelayanan administrasi perkantoran disesuaikan dengan kebutuhan. Dan secara keseluruhan proses layanan administrasi perkantoran berjalan dengan baik dan seluruh keperluan pada tahun

2024 telah terpenuhi. Dan pada tahun 2025 capaian akan ditingkatkan lagi sesuai dengan hasil evaluasi yang ada.

b. Pengadaan dan Pemeliharaan BMD

Secara umum sarana dan prasana yang dimiliki oleh Badan Kesbangpol Kab. Kutai Kartanegara, cukup memadai dalam seluruh kegiatan operasional selama ini. Namun dipandang perlu untuk menambah sarana dan prasarana pendukung lainnya untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik.

Adapun sarana dan prasarana pendukung yang dipandang perlu untuk memperbaiki tingkat pelayanan ke masyarakat dan akuntabilitas publik, adalah sebagai berikut :

1. Perlu membangun system/aplikasi berbasis komputer dalam pengelolaan database yang terintegrasi, yang dapat mengelola data parpol, ormas dan potensi konflik ipoleksosbud yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.
2. Kendaraan Operasional untuk pelaksanaan tugas ke wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
3. Sarana dan prasarana peralatan kerja banyak yang dalam keadaan rusak berat sehingga perlu diadakan penggantian
4. Sarana untuk penunjang penataan kearsipan belum memadai sehingga perlu dilengkapi
5. Adapun sarana dan prasarana pada Badan Kesbangpol sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana SKPD

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1	Station Wagon	11	Baik
2	Sepeda Motor	17	Baik
3	Perkakas bengkel listrik lainnya (dst)	1	Baik
4	Timbangan Cepat Kapasitas 200 Kg	5	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
5	Mesin Ketik Listrik	1	Baik
6	Mesin Ketik	7	Baik
7	Lemari Besi/Metal	50	Baik
8	Lemari Kayu	1	Baik
9	Rak Besi	4	Baik
10	Filing Cabinet Besi	24	Baik
11	Peti Uang/Cash Box/Coin Box	2	Baik
12	Locker	9	Baik
13	Laci Box	8	Baik
14	Lemari Kaca	1	Baik
15	Lemari Makan	1	Baik
16	Alat Penghancur Kertas	3	Baik
17	Mesin Absensi	2	Baik
18	Meja Resepsionis	2	Baik
19	Meja Rapat	5	Baik
20	Tempat Tidur Kayu	2	Baik
21	Kursi Rapat	8	Baik
22	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik
23	Mesin Cuci	8	Baik
24	Lemari Es	9	Baik
25	A.C. Split	38	Baik
26	Rice Warmer (Rak Kaca)	1	Baik
27	Televisi	14	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
28	Loudspeaker	9	Baik
29	Sound System	1	Baik
30	Microphone Floor Stand	1	Baik
31	Tangga Aluminium	2	Baik
32	Dispenser	14	Baik
33	Gordyin/Kray	100	Baik
34	Bracket Standing Peralatan	1	Baik
35	Alat Rumah Tangga Lain-lain (tralis)	1	Baik
36	Alat Rumah Tangga Lain-lain (Canopy)	1	Baik
37	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Baik
38	Hidran Kebakaran	1	Baik
39	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	Baik
40	Meja Kerja Pejabat Eselon II/III/IV	18	Baik
41	Meja Kerja Pejabat lain-lain	30	Baik
42	Meja Rapat Pejabat Eselon III	1	Baik
43	Meja Rapat Pejabat lainnya	21	Baik
44	Kursi Kerja Pejabat Eselon II/III/IV	14	Baik
45	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	100	Baik
46	Kursi Kerja Pejabat lainnya	4	Baik
47	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	2	Baik
48	Kursi Rapat Ruangan Data	4	Baik
49	Kursi Rapat Pejabat lainnya	32	Baik
50	Kursi Hadap Depan Meja Kerja lainnya	3	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
51	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	2	Baik
52	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat lainnya	1	Baik
53	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	6	Baik
54	peralatan studio audio lainnya (dst)	3	Baik
55	Camera Electronic	3	Baik
56	Slide Projector	7	Baik
57	Video Conference	1	Baik
58	Alat Studio Video Lainnya (Handycame)	2	Baik
59	Mesin Jilid	1	Baik
60	Mesin Potong (Rumput)	1	Baik
61	Mesin Barcode	5	Baik
62	Alat Studio Lainnya (CCTV)	2	Baik
63	Telephone (PABX)	1	Baik
64	Handy Talky (HT)	4	Baik
65	Alat komunikasi telephone lainnya (dst)-Ipel (HP)	1	Baik
66	Wireless Amplifier	3	Baik
67	Tabung O2	1	Baik
68	Kunci Sinyal	1	Baik
69	Serial Scanner/Printer	3	Baik
70	Kipas Penggerak Air	3	Baik
71	Internet	1	Baik
72	P.C Unit	29	Baik
73	Lap Top	22	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
74	Note Book	3	Baik
75	Hard Disk	8	Baik
76	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29	Baik
77	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	8	Baik
78	Peralatan Fitnes	3	Baik

Sarana dan prasarana yang digunakan aparaturnya pada tahun 2024 tidak banyak mengalami perubahan karena Pada tahun 2024 pelaksanaan pengadaan keperluan Badan Kesbangpol telah terpenuhi.

c. Pelaksanaan Administrasi Pelaporan BMD

Pengelolaan aset BMD dan capaian kinerja mempunyai standar baku yaitu disamping tepat penggunaan dan pelaksanaannya juga tepat waktu dalam penyelesaian pertanggungjawaban dan pelaporannya. Dampak dari ketidaktepatan waktu secara internal akan mengganggu perputaran ketersediaan dana dan capaian kinerja yang dibutuhkan pada saat itu, sedangkan secara eksternal ketidaksesuaian pelaporan dan ketepatan pertanggungjawaban akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk menuju kondisi ketepatan penggunaan dan pelaksanaan, ketepatan waktu pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut telah ditempuh langkah konkrit antara lain :

a. Mengupayakan ketepatan pelaporan BMD

Peranan unit kerja sebagai pemakai anggaran di dalam proses revolving sangat penting, karena cepat lambatnya pengajuan revolving sangat tergantung dari kelengkapan dan kebenaran dokumen pemakaian aset yang disampaikan ke Bagian Umum.

b. Ketepatan pertanggungjawaban

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan Laporan

BMD sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 Laporan BMD yang dibuat telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan, terdiri dari :

1. 2 (dua) dokumen Laporan BMD Semesteran
2. 1 (satu) dokumen Laporan Barang Milik Daerah Akhir Tahun

Capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2023 sebesar 100%, dan di tahun 2024 tetap dipertahankan dimana capaiannya sebesar 100%

d. Pelaksanaan Administrasi Pelaporan Keuangan

Pengelolaan keuangan dan capaian kinerja mempunyai standar baku yaitu disamping tepat penggunaan dan pelaksanaannya juga tepat waktu dalam penyelesaian pertanggungjawaban dan pelaporannya. Dampak dari ketidaktepatan waktu secara internal akan mengganggu perputaran ketersediaan dana dan capaian kinerja yang dibutuhkan pada saat itu, sedangkan secara eksternal ketidaksesuaian pelaporan dan ketepatan pertanggungjawaban akan mempengaruhi pemberian opini oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk menuju kondisi ketepatan penggunaan dan pelaksanaan, ketepatan waktu pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut telah ditempuh langkah konkrit antara lain :

- a. Mengupayakan ketersediaan kecukupan dana (cash flow)

Pada awal tahun anggaran Badan Kesbangpol mendapat Uang Persediaan (UP) dari Bendahara umum Daerah sebesar Rp. 500.000.000,-. Untuk kesinambungan ketersediaan UP maka dibutuhkan kecepatan proses administrasi pertanggungjawaban penggunaan dana dari UP hingga mencapai batas minimum 30% dari pagu UP untuk kemudian dilakukan revolving atau ganti uang persediaan. Peranan unit kerja sebagai pemakai anggaran di dalam proses revolving sangat penting, karena cepat lambatnya pengajuan revolving sangat tergantung dari kelengkapan dan kebenaran dokumen pemakaian anggaran yang disampaikan ke Bagian Keuangan.

- b. Ketepatan penggunaan anggaran dan ketepatan pertanggungjawaban

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyusunan Laporan Keuangan sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 Laporan Keuangan yang dibuat telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan, terdiri dari :

- 12 (dua belas) dokumen Laporan Keuangan Bulanan
- 4 (empat) dokumen Laporan Keuangan Triwulan
- 2 (dua) dokumen Laporan Keuangan Semesteran
- 1 (satu) dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun

Capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2023 sebesar 100%, dan di tahun 2024 tetap dipertahankan dimana capaiannya sebesar 100%

e. Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Badan Kesbangpol

Dalam sebuah penyusunan dokumen perencanaan diperlukan konsistensi dalam penyusunan dokumen turunan dari perencanaan 5 tahunan ke perencanaan 1 tahun, sehingga akan mempermudah dalam melakukan pengukuran kinerja

Untuk menuju konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan tersebut telah ditempuh langkah konkrit sebagai berikut :

a. Penyelesaian Rencana Kerja dan Capaian Kinerja SKPD

Dokumen rencana kerja yang telah dibuat pada tahun 2024 dan juga untuk tahun 2025 telah selesai sebelum proses musrenbang sehingga aspirasi yang masuk telah ditampung dan direalisasikan dalam bentuk program dan kegiatan OPD yang menyentuh kepada masyarakat, demikian juga dengan pelaporan capaian kinerja untuk LKjIP pada tahun 2024 telah diselesaikan tepat waktu namun belum mendapat nilai karena belum dilakukan reviu oleh Inspektorat, sedangkan laporan kinerja untuk setiap bulan kepada BAPPEDA Kutai Kartanegara telah dipenuhi melalui aplikasi E-Pantau.

Sampai dengan akhir tahun 2024 telah dibuat RENJA 2025, LKjIP 2023, LPPD 2023 dan laporan capaian kinerja bulanan tahun 2024 baik secara manual baik melalui aplikasi E –

PANTAU dan telah dilaporkan 12 laporan capaian kinerja dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan (100%)

b. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD selama tahun 2024 telah dilakukan monitoring oleh tim internal OPD agar mempermudah dalam kontrol apakah telah sesuai dengan program dan target kinerja yang telah ditetapkan, setelah itu setiap bulan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan dan bulan berikutnya akan dilakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi, terutama terkait dengan hasil dan dampak dari kegiatan tersebut terhadap kelompok sasaran kegiatan. Dengan demikian seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai hasil yang diharapkan kepada masyarakat khususnya. Dalam tahun 2024 terdapat 33 kegiatan yang dimonitoring dan dievaluasi sesuai dengan target yang ditetapkan (100%)

Capaian kinerja indikator ini dalam tahun 2023 sebesar 100%, dan di tahun 2024 tetap dipertahankan dimana capaiannya sebesar 100%

Tujuan 2 :

Terwujudnya Situasi yang Kondusif di Kabupaten Kutai Kartanegara

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis II sebagaimana diatas, diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja yaitu Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2022	2023	2024
Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%

Dari indikator tersebut diatas, telah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan, berikut analisis dari indikator tersebut :

Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti

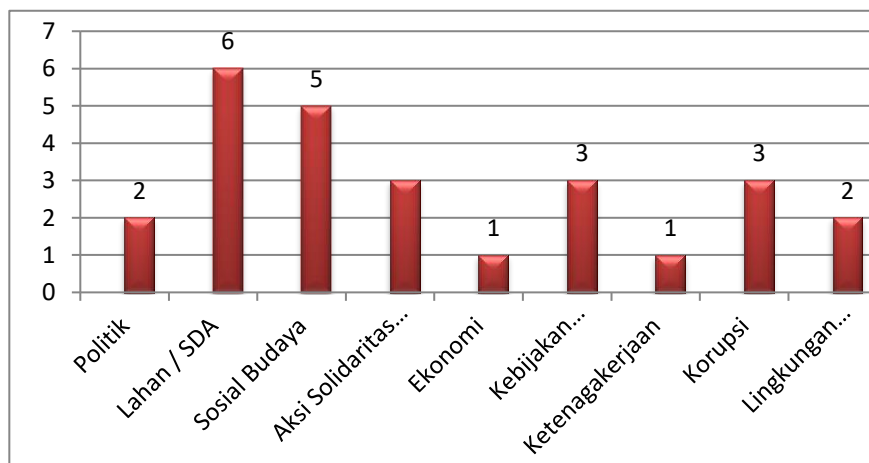
Untuk capaian indikator Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti, Badan Kesbangpol telah berupaya melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya memang terjadi kenaikan jumlah demo dan terjadi kasus yang mengarah SARA namun secara keseluruhan telah dilakukan penanganan sebagaimana tabel dibawah ini :

a. Data Gangguan dan Konflik

Secara umum kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2024 dalam kondisi yang sangat kondusif. Berdasarkan catatan bahan pengkajian permasalahan aktual daerah terdapat peningkatan jumlah aksi unjukrasa dibanding dengan tahun 2023

Pada tahun 2024 terdapat aksi unjukrasa sebanyak 27 kali aksi, sedangkan pada tahun 2023 aksi unjukrasa sebanyak 26 kali aksi. Dengan permasalahan yang dominan adalah berlatar Kebijakan Pemerintah, kemudian masalah lahan masyarakat dengan perusahaan dan masalah kebijakan pemerintah dalam kaitan penyediaan dan penyalangan masyarakat. Berikut disajikan data-data rekapitulasi kejadian selama tahun 2024

**Jumlah Kejadian Unjuk Rasa
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024**



**Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan latar belakang masalah)
di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024**

No	Latar Belakang Unjuk Rasa	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Politik							1	2	1			1	5
2	Lahan / SDA	1	2				2			1				6
3	Sosial Budaya			1		1								2
4	Aksi Solidaritas peristiwa Kemanusiaan nasional/ internasional					1		1			1			3
5	Ekonomi			1										1
6	Kebijakan Pemerintah dan Pelayanan Publik			3		1		1						5
7	Ketenagakerjaan					1	1							2
8	Korupsi	1			1	1								3
9	Lingkungan Hidup													0
Jumlah Unjuk Rasa		2	2	5	1	5	3	3	2	2	1	0	1	27

**Rekapitulasi Data Unjuk Rasa/Demo (berdasarkan kelompok aksi)
di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024**

No	Pelaku Unjuk Rasa	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Mahasiswa (Organisasi & Kelompok Mahasiswa)			2	1	2		1	1					7
2	Gabungan Organisasi (Mahasiswa, Ormas, OKP, parpol dan Masy.)					1							1	2
3	Ormas / LSM	1				1			1	2	1		1	7
4	Elemen Masyarakat	2	2	3			2							9
5	Karyawan / Sarikat Pekerja			1		1								2
6	Organisasi Profesi													0
Jumlah Pelaku Unjuk Rasa			3	2	6	1	5	2	1	2	2	1	2	27

Berikut data kejadian sengketa hubungan industrial dan penanganan sengketa yang terjadi sepanjang tahun 2024

**Rekapitulasi Data Sengketa Hubungan Industrial
di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024**

No	Jenis Sengketa	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Sengketa Pengusaha dengan Perusahaan / Pemerintah													-
2	Sengketa Pekerja dan Pengusaha						1							1
3	Pemogokan Kerja													-
4	Penyelesaian Sengketa Buruh													
5	Mediasi Sengketa Perusahaan dan Masyarakat													
Jumlah Sengketa Hubungan Industrial		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1

A. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

Penyelenggaraan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat pada dasarnya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia serta perlu peningkatan peran masyarakat untuk lebih aktif.

Permasalahan ini memerlukan suatu penanganan terpadu dan jalan keluar yang cepat, tepat dan terukur. Guna mendukung hal tersebut, dibutuhkan penyediaan data dan informasi aktual serta akurat. Sehingga diperlukan langkah-langkah kegiatan yang sinergis.

Dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian dari pemerintah daerah yang sebagai leading sektor dalam koordinasi dalam menjaga keamanan di daerah. Hal ini dengan dibentuknya wadah/forum yang dapat mensinergikan seluruh kebijakan strategis berkenaan menjaga keamanan di daerah yaitu dengan dibentuknya:

1. Nama Forum : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Dasar Hukum : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengkoordinasian Operasi dan Kegiatan Intelijen Seluruh Instansi Dalam Rangka Deteksi Dini Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (AGHT) terhadap Stabilitas Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
4. Permendagri Nomor 49 tahun 2010 tentang Pemantauan Orang asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah.
5. Permendagri Nomor 50 tahun 2010 tentang Pemantauan Tenaga Asing di daerah.
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/1514/SJ tanggal 9 Maret 2018 tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 35 tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 494/SK-BUP/HK/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Tujuan : 1. Sebagai wadah/forum dalam pertukaran data dan informasi Intelijen sehingga dapat diolah menjadi rekomendasi untuk disampaikan kepada Pimpinan Daerah (sebagai User) untuk mengambil kebijakan lebih lanjut dalam menjaga kondusifitas daerah.
2. Dalam rangka meningkatkan sinergitas dalam pertukaran data dan informasi tentang permasalahan yang bisa menjadi pemicu permasalahan konflik dimasing-masing OPD kemudian secara

bersama menganalisa data dengan informasi intelijen untuk dihasilkan sebuah rekomendasi yang dapat dimanfaatkan oleh Kepala Daerah dalam mengambil kebijakan strategis.

3. Koordinasi yang dilakukan oleh Kominda berfungsi untuk memelihara hubungan baik dalam berbagai institusi lintas sektoral yang melibatkan banyak orang dari unsur intelijen.
4. Membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengkompilasi dan mengkoordinasi informasi bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Ketahanan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (IPOLEKSOSBUDHANKAM) yang berpengaruh terhadap segala aspek yang menjadi hambatan, gangguan dan acaman kondisi yang kondusif terhadap kebijakan politik dalam negeri di daerah.
5. Melakukan kompilasi tukar-menukar informasi intelijen dari berbagai instansi terkait sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut baik tindakan preventif maupun refresif agar dapat mempertahankan kondisi yang kondusif.

Keanggotaan

- : 1. Bupati Kutai Kartanegara (Ketua 1)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Ketua 2)
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Ketua 3)
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 1)
5. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 2)
6. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris/Pelaksana Harian 2)
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara;
8. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara;
9. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
10. Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
12. Koordinator Wilayah Badan Intelijen Negara Daerah Kutai Kartanegara, Kutai Barat dan Mahakam Ulu;
13. Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0906/TGR;
14. Kasat Intelkam Kepolisian Resor Kutai Kartanegara;
15. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara;
16. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan dan Kewarganegaraan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Nama Forum : **Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.**

Dasar Hukum :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
 4. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 460/964.SJ tertanggal 23 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam melaksanakan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 5. Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 219/SK-BUP/HK/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan :1. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
 2. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik dan upaya penanganannya;
 3. Melakukan upaya-upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 4. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik;
 5. Mengkoordinasikan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam upaya penghentian konflik dalam skala Kecamatan;

Keanggotaan

6. Melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;
- : 1. Bupati Kutai Kartanegara (Ketua)
2. Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 1);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 2);
4. Kapolres Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 3);
5. Dandim 0906/TGR (Wakil Ketua 4);
6. Kajari Kutai Kartanegara (Wakil Ketua 5);
7. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara (Sekretaris);
8. Kepala Bagian Operasi Polres Kutai Kartanegara (Wakil Sekretaris 1);
9. Perwira Seksi Operasi Kodim 0906/TGR (Wakil Sekretaris 2);
10. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara;
14. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kutai Kartanegara;
16. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara;
17. Kepala Pos Daerah Badan Intelijen Negara Kabupaten Kutai Kartanegara;
18. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
20. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
21. Kepala Sub Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
22. Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan dan Kewarganegaraan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara;

3) Nama Forum : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

- Dasar Hukum**
- :1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Tujuan Forkopimda : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dibentuk untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Forkopimda juga berfungsi sebagai media komunikasi dan koordinasi antarinstansi pemerintah.

- Menjalin hubungan kerja antarinstansi pemerintah
- Bertukar pikiran untuk mendapatkan kesimpulan, solusi, dan kesepakatan
- Menyelesaikan permasalahan faktual di daerah
- Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Menjamin pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan di daerah
- Memfasilitasi hubungan kerja Forkopimda dengan pemerintah daerah
- Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi kepala daerah
- Melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah secara periodik

Tugas Forkopimda :

a. Forum

1. menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah;

2. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi pembangunan daerah, pemerintahan daerah dan stabilitas daerah;
3. memberikan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati atas kondisi yang sangat dibutuhkan daerah dan/atau masyarakat yang terkait dengan urusan pemerintahan umum;
4. menjadi narasumber pada setiap pertemuan dan Rapat-rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah serta pada forum pertemuan lainnya; dan
5. melaporkan pelaksanaan kegiatan.

b. Sekretariat

1. mempersiapkan materi dan bahan-bahan yang diperlukan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
2. menyelenggarakan administrasi untuk kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
3. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah; dan
4. membuat laporan pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Keanggotaan :

A. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

- Ketua : Bupati Kutai Kartanegara
 Wakil : Wakil Bupati Kutai Kartanegara
 Anggota : 1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Komandan Kodim 0906/TGR
 3. Kapolres Kutai Kartanegara
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara
 5. Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong

B. Sekretariat

- Sekretaris : Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
 Anggota : 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.
 2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

3. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Sub Koordinator Bidang Ideologi dan Kewaspadaan, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Kasubag Protokol, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Perencana
 - Sub Kord Penyusunan Program, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Analis Kebijakan Ahli Muda
 - Sub Koord Bidang Ketahanan Sosial dan Budaya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara).

Kegiatan – Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk melalui Surat Keputusan 494/SK-BUP/HK/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang bertujuan pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah.

Tugas dan fungsi Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah dalam rangka :

1. Merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini;
2. Mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan;
3. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini di wilayahnya dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di daerah Kabupaten/Kota yang mengancam stabilitas nasional; dan
4. Memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan.

Pendanaan kegiatan Kewaspadaan Dini Kabupaten Kutai Kartanegara melekat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara melalui :

Program	: Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
Sub. Kegiatan	: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Jenis Kegiatan	: 1. Pemantauan deteksi (AGHT) di 18 Kecamatan. 2. Melaksanakan Kegiatan fungsi intelijen, yakni penyelidikan, pengamanan dan penggalangan atas sebuah kasus. 3. Rapat Koordinasi pembahasan permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah. 4. Pembuatan analisis dan rekomendasi (problem solving) atas permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah untuk disampaikan kepada pimpinan daerah untuk diambil kebijakan lebih lanjut. 5. Pembentukan dan Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) ditingkat kabupaten dan kecamatan. Dimana FKDM ini bertugas di setiap Kecamatan sebagai pengumpul bahan keterangan (pulbaket) informasi, agar informasi dapat diperoleh secara cepat dan akurat (temu cepat, lapor cepat).

Koordinasi yang dilakukan oleh Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (Tim wasdin) dilakukan setiap bulan dan minimal setiap tiga bulan, untuk membahas isu-isu strategis atas informasi yang disampaikan oleh Anggota FKDM Kabupaten dan Kecamatan serta Jaring Agen. Hasil Rapat

Kominda disusun sebagai rekomendasi kepada Pimpinan Daerah (Bupati) atas isu-isu aktual dan strategis

2. Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Kabupaten Kutai Kartanegara telah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan diterbitkannya SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 219/SK-BUP/HK/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik.

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
- b. Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
- c. Memberikan informasi kepada publik tentang terjadi konflik dan upaya penanganannya;
- d. Melakukan upaya-upaya pencegahan melalui system peringatan dini;
- e. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan di dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik;
- f. Mengkoordinasikan Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam upaya penghentian konflik dalam skala Kecamatan;
- g. Melakukan upaya pemulihan pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi;

Untuk keterpaduan aksi pada masing-masing instansi yang bertanggung jawab atas tercapainya target maka kerangka kerja dari Tim Terpadu yang berisikan tahapan :

Pertama, Pembahasan Personalia Keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan pelibatan SKPD dan instansi vertikal di daerah yang terkait.

Kedua, Penetapan pembagian tugas SKPD dalam kegiatan

1. Pencegahan Konflik;
2. Penghentian / Penyelesaian Konflik
3. Pemulihan Pasca Konflik.

Ketiga,

Penyusunan dan Pembahasan Rencana Aksi Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dan penetapan Instansi Vertikal/ SKPD yang bertanggung Jawab atas pelaksanaan Rencana Aksi

RENCANA AKSI TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024	
A. PENCEGAHAN	
1. Konflik Sosial	
a. Penanaman Nilai-Nilai Wawasan Kebangsaan dan Karakter (3 RA)	
b. SARA (2 RA)	
c. Politik (1 RA)	
d. Ekonomi / Industrial (1 RA)	
2. Dukungan Pelaporan Penanganan Pandemi Covid-19 (1 RA)	
B. PENGHENTIAN / PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DAN TERORISME	
1. Penghentian Konflik / Terorisme (4 RA)	
2. Penyelesaian Konflik Sosial Dan Terorisme	
a. Sebelum Tahun 2024 (1 RA)	
b. Sejak Tahun 2024 (2 RA)	
C. PERCEPATAN PENEGAKAN HUKUM	
a. Sebelum Tahun 2024 (2 RA)	
b. Sejak Tahun 2024 (2 RA)	
D. FASILITASI FORKOPIMDA, KEWASPADAAN DINI DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2024 (1 RA)	
E. PELAPORAN PENANGANAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI TAHUN 2024 (1 RA)	

Pada awalnya ditahun 2013 – 2014 pelaporan progress pelaksanaan rencana aksi terpadu disampaikan kepada Kemenko Polhukam / Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Gangguan

Keamanan Dalam Negeri Pusat melalui sistem monitoring UKP4 seluruh data diupload (entry data) melalui website Serambi UKP4 : <http://serambi.ukp.go.id>. Dengan masa pelaporan B.03, B.06, B.09 dan B.12.

Mulai tahun 2015 hingga tahun 2024 pelaporan progress pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial dilaporkan secara manual kepada Sekretariat Tim Terpadu Provinsi melalui Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur dengan menyerahkan laporan berupa softcopy dan hardcopy data pendukung setiap rencana aksi yang dilaksanakan dengan masa pelaporan B04, B08 dan B12..

Masa Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi

Periode Pelaporan	Masa Pelaporan	Evaluasi Timdu Pusat
Periode B-04	27 April – 6 Mei 2024	5 Juni 2024
Periode B-08	27 Ags – 6 Okt 2024	8 September 2024
Periode B-12	27 Des – 6 Jan 2024	10 Januari 2025

Pada Tahun 2024 pelaporan progress capaian pelaksanaan rencana aksi penanganan konflik sosial dilaporkan melalui sistem penyimpanan data digital Google Drive yang dibangun oleh Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur.

Semua data pendukung capaian target pelaksanaan rencana aksi diupload melalui akun : timdu_Kukar@gmail.com pada penyimpanan data digital Google Drive Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Timur.

Pendanaan kegiatan Tim Terpadu Penanganan konflik Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara melekat pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara melalui :

Program	: Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
Kegiatan	: Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
Sub. Kegiatan	: Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
Jenis Kegiatan	: 1. Pemantauan Pemantauan Gangguan Keamanan di 20 Kecamatan. 2. Melaksanakan Koordinasi penyelesaian konflik sosial dengan SKPD yang menjadi leading sektor terkait penyebab kejadian konflik. 3. Rapat Koordinasi pembahasan permasalahan aktual dan isu-isu strategis di daerah. 4. Mensinergikan seluruh kegiatan rencana aksi kepada Instansi Vertikal di daerah dan SKPD terkait sebagai langkah memaksimalkan pencapaian target yang telah ditetapkan, sehingga dapat meminimalisir konflik yang muncul. 5. Penanganan Konflik Sosial yang terjadi dikecamatan, dengan langkah awal penanganan konflik dilakukan aparat pemerintah kecamatan yang kemudian dilaporkan kepada Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten. 6. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten nenindaklanjuti kejadian konflik yang tidak dapat diselesaikan ditingkat pemerintahan kecamatan. 7. Melaporkan progres capaian pelaksanaan rencana aksi sesuai target yang telah ditetapkan.

c. Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerbitkannya SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 218/SK-BUP/HK/2024 tanggal 4 Juli 2024 tentang Pembentukan Forum Dan Sekretariat Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di daerah;
- b. mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah bagi pembangunan daerah, pemerintahan daerah dan stabilitas daerah;
- c. memberikan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati atas kondisi yang sangat dibutuhkan daerah dan/atau masyarakat.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum lingkup daerah kabupaten, Forkopimda kabupaten bertugas melaksanakan:

- a. koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional;
- d. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- e. koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diatas Forkopimda kabupaten/kota melaksanakan kegiatan :

- a. koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/ atau masyarakat di wilayah kabupaten/kota;
- b. koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota;
- c. koordinasi, pemantauan, dan fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum di wilayah kabupaten / kota;
- d. deteksi dini, cegah dini, dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah kabupaten/kota; dan
- e. kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan Forkopimda di wilayah kabupaten/kota dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kewaspadaan Dini Daerah

Pengukuran realisasi kegiatan untuk kegiatan Fasilitasi Kewaspadaan Dini di daerah sangat sulit, karena output dari kegiatan tidak dapat diukur secara kuantitatif. Namun pengukuran realisasi kegiatan kominda adalah sejauhmana fungsi dan peran Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah dan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dapat melakukan langkah deteksi dini dan cegah dini permasalahan-permasalahan yang terjadi, sehingga permasalahan yang tidak menjadi konflik yang meluas dan diselesaikan secara cepat dan tepat.

Kegiatan deteksi dini yang dilaksanakan dengan menitik beratkan pada Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap Stabilitas Daerah dan Nasional, dengan bidang IPOLEKSOSBUDHANKAM (Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan). Berikut ini disampaikan garis besar hasil pemantauan deteksi dini di Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2024 :

**Isu Strategis dan Permasalahan Aktual
berdasarkan Pengumpulan Informasi Deteksi Dini**

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Catatan
Ideologi	Keberadaan Organisasi Islam Garis Keras “Khilafatul Muslimin”	- Jahab, Tenggarong - Sangasanga	- Jumlah pengikut ± 102 orang - Faham ini tidak mengakui pemerintah mempunyai keinginan untuk membentuk Negara sendiri dengan istilah Khilafah - Memiliki Pondok Pesantren Al – Ukhuwah Islamiyah Khilafatul Muslimin Pengikut /santri tidak pernah melaporkan keberadaan santri / pengikut kepada pemerintahan setempat (kelurahan) untuk administrasi kependudukan. - Kelompok KM yang berada di Jahab merupakan Amir Wilayah Borneo. - Keberadaan kelompok ini harus diwaspadai
Politik	1. Pemilu Serentak 2024, untuk memilih : - Anggota DPR Pusat - DPD Pusat - DPRD Provinsi - DPRD Kabupaten - Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2. Pilkada Serentak 2024, untuk memilih : - Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Periode 2025-2030 - Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara	Kab. Kutai Kartanegara	- Suksesi Pimpinan dan pengurus Partai Politik di Kabupaten Kutai Kartanegara, yangmana banyak kepentingan agenda politik Daerah maupun agenda kepemimpinan Nasional menghadapi Pemilu 2024. - Adanya upaya mengusai pucuk pimpinan Partai Politik di Daerah dalam rangka mengamankan agenda politik pada pemilihan Bupati dan Gubernur. - Membangun kekuatan untuk

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Catatan
			menghadapi Pemilu Legislatif dan Presiden tahun 2024 • Terjadinya konflik antar pendukung caleg maupun pasangan calon perlu di waspadai untuk menghindari terjadinya konflik horisontal.
Ekonomi	1. Potensi Gangguan Keamanan akibat banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang Tambang Batubara yang tidak beroperasi.	Kecamatan Lokasi Perusahaan Batubara	• Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) • Banyaknya Perusahaan yang belum menyelesaikan hak-hak karyawan yang telah di PHK
	2. Banyaknya terjadi peselisihan antara warga masyarakat dengan perusahaan terkait lahan/SDA	• Kecamatan Lokasi Perusahaan Batubara dan perkebunan Kelapa Sawit	• Lahan menjadi sumber konflik dan sangat sering terjadi antar warga / kelompok tani dengan perusahaan. • Pada konflik ini sering dimanfaatkan oleh ormas baik mendukung masyarakat maupun mendukung korporasi
	3. Gesekan antar warga dengan perusahaan pemanfatan koridor batubara (eks Tambang)	• Kecamatan Lokasi Perusahaan BatubaraKoridor	• Penggunaan jalan umum untuk kegiatan hauling menuju stock pile yang meresahkan masyarakat karena jalan umum menjadi rusak • Meningkatnya kejadian banjir dikala hujan
Sosial Budaya	1. Ormas berlatar belakang Kedaerahan	18 Kecamatan	• Kehadiran Ormas kedaerahan yang meresahkan masyarakat karena sering menimbulkan konflik • Ormas kedaerahan yang banyak dimanfaatkan oleh perusahaan/ pengusaha untuk mengintimidasi pihak lain

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Catatan
			Ormas kedaerahan yang menjadi preman bagi perusahaan
	1. Keberadaan Penganut Agama Baha'i	Tenggarong	- Jumlah pengikut ± 70-80 orang - Terjadi tuntutan pengikut untuk pencantuman identitas keagamaan dalam administrasi kependudukan dan sekolah.
	2. Keberadaan Faham Aliran Syiah	Tenggarong	- Jumlah pengikut ± 40-100 orang - Telah membentuk Yayasan untuk kegiatan sosial dengan nama yayasan "GHIPARI" - Pada tahun 2016, penganut faham Syiah telah membentuk Ormas yang bernama Pada Ahlulbait Indonesia (ABI) Kutai Kartanegara. - Untuk diketahui bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) Ahlulbait Indonesia (ABI) Kutai Kartanegara sudah terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dengan SKT No. 00-23-01-0005/II/2016 dengan Ketua Bintoro Wibono dan Sekretaris Ahmad Fauzi.
Hankam	Simpatisan Jaringan Teroris JAD (Jamaah Ansharut Daulah) di Indonesia adalah pecahan Jamaah Islamiyah (JI) yang terafiliasi ke ISIS. Penyebaran faham radikal dan terorisme	- Kecamatan di daerah Pesisir - Tenggarong, - Loa Janan - Loa Duri	- Persembunyian pelaku BOM Bali I di Tanjung Berukang Anggana tahun 2002 - Penangkapan Teroris di Loa Janan Kab. Kukar tahun 2011 - Simpatisan kelompok radikal kanan

Bidang	Isu Strategis	Lokasi	Catatan
			- mulai tahun 2018 hingga 2024 terdapat 5 (lima) narapidana teroris yang akan berakhir masa pidananya dan kembali kepada masyarakat, sehingga perlu pengawasan dari pihak terkait. - Adanya kemungkinan sel-sel pengikut Jamaah Asharut Daulah yang terus hidup dan berkembang di Kutai Kartanegara

b. Realisasi Kegiatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

Meningkatnya intensitas konflik sosial bersifat horizontal dan vertikal beberapa tahun terakhir, memposisikan penyelenggaraan pemerintahan dalam situasi sulit. Kelemahan pemerintah dalam menangani kasus konflik sosial menjadi celah institusi sosial yang diperankan tokoh-tokoh radikal menggantikan fungsi dan peran pemerintah, akibatnya konflik sosial semakin merata penyebarannya.

Beberapa permasalahan yang bisa memicu terjadinya konflik di Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini baik konflik yang berlatar belakang Sumber Daya Alam, Lahan, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Hubungan Industrial Ketenaga kerjaan, batas wilayah maupun konflik antar Etnis dan Agama (SARA).

Berikut Data penanganan Konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara sepanjang tahun 2024 :

No	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
1.	Aksi Warga Dusun Sikodadi Kel. Mangkurawang Tolak aktivitas Tambang Ilegal (31/1/2024), yang dimotori oleh ibu-ibu yang melakukan aksi penghentian aktivitas tambang yang diduga ilegal,	1 kejadian	melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, aparat kecamatan dan Kelurahan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antar warga dan pekerja. Kemudian meminta aparat keamanan untuk menindaklanjuti temuan dilokasi

No	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
	Bukan tanpa alasan, masyarakat setempat kompak menyuarakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan. Karena sudah merasakan dampak buruknya. Mulai dari merusak area persawahan, hingga mengakibatkan banjir di pemukiman warga. Sebanyak 3 titik didatangi oleh warga. Dari 3 lokasi berbeda tersebut, mereka mendapati 3 unit ekskavator yang sedang terparkir di lokasi penambangan. Parahnya lagi, lubang tambang koridoran ini hanya berjarak sekitar 100 meter dari lahan pertanian warga (ditambang itu berada di kawasan perbukitan di RT 15. Dan langsung bersebelahan dengan sawah warga)		apakah penambangan ini legal atau tidak, jika ilegal maka ditindak secara hukum
2.	Konflik lahan antara kelompok tani dengan PT. Budi Duta Agromakmur yang berlokasi di Jahab Kecamatan Tenggarong. Dimana masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani merasa lahan garapan mereka dirampas oleh PT. DBA, kasus ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian, namun warga merasa tidak ada tindak lanjut. terlebih saat ini warga merasa dibenturkan dengan Ormas Laskar Boneo yang diduga dibayar oleh PT. BDA. Warga meminta agar PT. BDA untuk menghentikan Land Clearing, dan meminta agar PT. BDA tidak menggunakan ormas untuk mengintimidasi warga, dan meminta difasilitasi untuk membahas masalah ini dengan Bupati. (22/2/2024)	3 kejadian	melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, aparat kecamatan dan Kelurahan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antar warga dan pihak perusahaan. Kemudian meminta kepada aparat keamanan untuk bernegosiasi kepada perusahaan untuk tidak memakasi jasa pengamanan dari ormas yang nantinya akan menjadikan potensi konflik dengan warga. mengkomunikasikan kepada BPN dan OPD dan yang membidangi pertanahan untuk memeriksa keabsahan dokumen lahan yang disengketakan. Pemrintah Daerah melaksanakan Rapat Membahas rencana Identifikasi dan Inventarisir Tanam Tumbuh Waega yang Mengklaim tergusur oleh kegiatan land clering PT Budiduta Agromakmur Di Kec Tenggarong dan Kec Loa Kulu. Rapat dipimpin Asisten 1 setkab Ahmad Taufik Hidayat Si.MM Senin tgl 10 Juni 2024, dengan menghadirkan KODIM, POLRES, Dinas Trannaker, Dinas Perkebunan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Bag Hukum, Tata Pemerintaham, Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong, ATR/BPN. Kesbangpol.

No	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
			Rapat koordinasi dalam rangka penyampaian hasil identifikasi dan inventarisasi tim pemerintah Kab. Kukar pada areal HGU PT. Budi Duta Agromakmur, dipimpin oleh Bapak Akmad Taufik (Asisten Pemerintah dan Kesra Pemkab Kukar) dan dihadiri oleh Akmad Taufik (Asisten Pemerintah dan Kesra Pemkab Kukar), Yani Wardhana, S.Sos (Kabag Pemerintahan Kab. Kukar), Aditya sanjaya, ATR/BPN Provinsi, Kapten Inf Slamet Widodo, Danramil 0906-02 Loa kulu, Lettu Inf Siswo, R. Dan unit 0906/ Kkr, Ipda Priyo, Kanit Binmas Polsek Loa kulu, Fauzan (Kasi BPN Kukar), Husni Tamrin, lawyer PT. Budi Duta Agromakmur, Rudianto Sulistyo (Wakil Ketua PDKT Kaltim), Hendrik Tando (Wakil Ketua DAD Kaltim), Matius Kuna (Tim pembebasan Laham), Wardi (Humas PT. BDAM). Dalam rapat tersebut disampaikan hasil identifikasi, pengecekan dan inventarisasi di lokasi yang ditunjukan warga, dengan dilakukan plotting area dan pulbaket terhadap lahan yang diakui penuntut. pada area-area yang terjadi land clearing oleh PT. BDAM Tahun 2023/2024. Dan pada area-area tersebut saat ini telah juga ditanami Kelapa Sawit (kecil/baru) oleh PT. BDAM, sehingga terhadap pengakuan tanam tumbuh yang menuntut warga penuntut hampir tidak ada ditemukan adanya bekas tanam tumbuh yang dituntut tersebut. namun Dari 9 bidang klaim lahan yang dilakukan pengecekan oleh Tim pada areal yang ditunjukkan warga penuntut kerusakan land clearing tidak ada di temukan adanya bekas tanam tumbuh yang dituntut tersebut pada area-area LC PT, BDAM, hanya didapati terhadap 3 bidang klaim lahan (3 orang) yang disekitar lahan
3.	Aksi Penolakan warga desa Kedang Ipil Kec. Kota Bangun darat atas aktivitas blasting PT. Kartika Sela bumi Minning (PT.KSM), warga berkeberatan karena banyak rumah warga menjadi retak, warga menuntut kompensasi Rp. 50jt per rumah, dan	1 kejadian	melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, aparat kecamatan dan Kelurahan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antar warga dan pihak perusahaan. Mendorong kepada pihak Pemerintah kecamatan Kota Bangun Darat dan Pemdes Kedang Ipil untuk melakukan

No	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
	kompensasi kebisingan dan debu sebesar Rp. 3jt/KK serta meminta perusahaan membantu fasilitas air bersih untuk warga. (29/2/2023) Dalam pertemuan dilapangan, pihak manajemen PT. KSM menyetujui untuk penyediaan air bersih, dan meniadakan kegiatan blasting di blok Osor Timur, kemudian tidak bersedia memberikan kompensasi 50jt setiap rumah yang retak , namun perusahaan akan memperbaiki rumah warga yang retak tersebut.		pertemuan antar perusahaan dan warga untuk mengambil langkah kongkrit untuk atas tuntutan warga dan hal-hal yang akan dipenuhi pihak perusahaan, hal ini untuk mengawal agar tidak terjadi bentrokan yang bisa merugikan warga dan perusahaan.
4.	Dilaksanakan pertemuan dan mediasi atas tuntutan warga Muara Badak yang berkeinginan agar menjadi prioritas jadi karyawan di PT. CHAS, pertemuan dilaksanakan di café Rindang Desa Batu-Batu Kecamatan Muara Badak (3/3/2024).	1 kejadian	melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, aparat kecamatan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antar warga dan pihak perusahaan. Mendorong kepada pihak kecamatan untuk terus membangun komunikasi yang baik dengan PHSS dan perusahaan kotraktor, agar mengutamakan penerimaan pekerja lokal sesuai keahlian. Pertemuan dihadiri Arpan, S. Sos Camat Muara Badak, AKP Gatot Siswanto, S. Sos Kapolsek, IPTU Lamser Wakapolsek, Serda Zainal Koramil, Nur Sidik, SH Kasi Trantib, Ardiansyah Relation PHSS, Ruly Ketua Asosiasi Operator Kec Muara Badak, Andi Fery Korlap aksi, Bapak Ramadhan Wadan KOTI PP PAC Muara Badak, Irwansyah Bendahara Asosiasi, Adam Malik perwakilan PT CHAS, Dede Maulana perwakilan PT CHAS. adapun kesimpulan dari pertemuan tersebut adalah : a. Meminta kepada pihak PT chass sebagai USER untuk transparansi terhadap penerimaan tenaga terkhusus untuk orang badak. c. Meminta untuk perlunya pemberitahuan dan informasi kepada pihak asosiasi jika ada perekrutan untuk menghindari adanya orang dalam yang memasukkan orang dari luar muara badak untuk bekerja di perusahaan. d. Terkait recruitment PT. CHAS selalu berkomunikasi dengan pihak Kecamatan

No	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
			e. Terhadap Pihak PT Chas Tidak adanya pemberitahuan atau Follow up dari PT. CHAS tentang Rekrutmen yang telah di proses Lamarannya Kedepannya sesuai skill pelamar. f. Pihak LSM Maupun dari pihak perusahaan Bisa berkoordinasi dengan baik Serta adanya keterbukaan.
5.	Pertemuan dan Mediasi Terkait Permasalahan Adanya Warga yang Protes Terkait Keberadaan Gereja Kemah Injil Indonesia (GKI) Pos Pembinaan Umat Pniel KM 43 RT 15 Kel Sungai Merdeka Kec Samboja Barat (22 Maret 2024).	1 kejadian	melakukan koordinasi dengan pihak keamanan, aparat kecamatan dan Kelurahan untuk mengantisipasi terjadinya bentrok antar warga. Mendorong kepada pihak Pemerintah Kelurahan Sungai Merdeka dan kecamatan Samboja Barat serta Polres dan Koramil untuk mendinginkan suasana dan memonitoring perkembangan di wilayah untuk menghindari konflik SARA. Kemudian mendorong dialog bersama FKUB untuk proses perizinan rumah ibadah. Catatan : Sdr. Yusriansyah bahwa ada ibadah di rumah sdr. Andreas Kurata yang diduga tidak mempunyai surat izin sebagai rumah ibadah. Atas laporan tersebut pada hari Kamis 21 Maret 2024, Drs Agus Santosa (Lurah Sungai Merdeka), Aiptu Arold (Bhabinkamtibmas), Sertu Edi Sutrisno (Babinsa) mendatangi lokasi rumah Sdr Andreas Kurata di Jalan Soekarno Hatta KM 43 RT 15 Kel Sungai Merdeka Kec Samboja Barat, Dan tidak lama kemudian Sdr Yusriansyah bersama sama dengan 10 (sepuluh) orang warga lainnya tiba di rumah Sdr Andreas Kurata. Lurah Sungai Merdeka menyampaikan bahwa besok hari Jumat tanggal 21 Maret 2024 akan dilaksanakan sosialisasi dan pertemuan terkait keberadaan Gereja Kemah Injil Indonesia di KM 43 RT 15 Kel Sungai Merdeka Kec Samboja Barat Pukul 20.00 wita bertempat di kantor Lurah Sungai Merdeka Kec Samboja Barat Lurah Sungai Merdeka (Drs Agus) memanggil Sdr Yusriansyah dkk dan dilaksanakan pertemuan dan dalam pertemuan tersebut turut hadir sbb : Drs Agus Santosa (Lurah Sungai Merdeka), 2. Aiptu Arold R

No	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
			(Bhabinkamtibmas Kel Sungai Merdeka), Yusriansyah (Warga RT 15 Kel Sungai Merdeka), Jumri (Warga RT 15 Kel Sungai Merdeka), Mustani (Warga RT 15 Kel Sungai Merdeka) Maturidi (Warga RT 15 Kel Sungai Merdeka), Syahfandi Asnawi (Warga RT 15 Kel Sungai Merdeka), Baharuddin (Warga RT 15 Kel Sungai Merdeka), Dalam pertemuan tersebut Sdr Yusriansyah membuat surat Pernyataan bahwa atas permasalahan yang ada di rumah Sdr Andreas Kurata memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setiap warga negara berhak melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing.
6.	warga Muara Badak yang bergabung dalam Aliansi Gabungan Rakyat Muara Badak menuntut kesempatan kerja dan Pemberdayaan Pengusaha lokal dapat bekerjasama dengan PT PHSS	1 kejadian	Mediasi Management PT PHSS dan Aliansi Gabungan Rakyat Muara Badak yang dihadiri Forkopimcam dengan pembahasan penyampaian aspirasi tentang kesempatan kerja dan Pemberdayaan Pengusaha lokal dapat bekerjasama dengan PT PHSS (10/7/2024)
	Konflik lahan Kuburan yang berada di RT.04 Kelurahan Kampung lama Kecamatan Samboja seluas 3,865M2 yang masuk dala SHGB PT. PENGELOLA LIMBAH KUTAI KARTANEGARA. HEAD OFFICE. Jl. Gunung Pasir, Samboja	1 kejadian	Informasi adanya konflik lahan perkuburan yang berada di RT.04 Kelurahan Kampung lama Kecamatan Samboja seluas 3,865M2 yang masuk dala SHGB PT. PENGELOLA LIMBAH KUTAI KARTANEGARA disampaikan oleh FKDM Kecamatan Samboja, dari informasi tersebut Tim Kewaspadaan Dini Kabupaten mengkoordinasikan kepada Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan Samboja untuk mendorong kepada Lurah Kampung Lama untuk mengadakan rapat dengan manajemen PT. ENGELOLA LIMBAH KUTAI KARTANEGARA untuk membahas hal tersebut. Sehingga pada hari Kamis 25 Juli 2024 pukul 10.00 Wita bertempat di BPU Kelurahan Kampung Lama dilaksanakan rapat bersama Manajemen PT. PLKK, yang juga dihadiri Ketua RT 01 sampai 08, Pengurus Persatuan Rukun Kematian "Ar Rahman", Tokoh Masyarakat serta Bhabinkamtibmas. dari pertemuan tersebut disepakati untuk lakukan pengukuran ulang oleh BPN Kukar.

No	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
	Konflik Kesalahpahaman terkait Sultan Tidak mendapat undangan untuk menghadiri peringatan HUT RI di IKN	1 kejadian	Pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 kepala Badan Kesbangpol menghadap kepada Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Aji Muhammad Arifin untuk menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya dan menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan administrasi persuratan yang dikeluarkan oleh Badan Kesbangpol
	Konflik Lahan antara kelompok tani (warga Kelurahan Jahab) dengan PT. Budi Duta Agromakmur yang berlokasi di Jahab Kecamatan Tenggarong. Dimana masyarakat warga menyandra 3 (tiga) orang anggota Brimob yang berjaga di perusahaan dan 1 orang karyawan. 4 orang tersebut ditahan di rumah i Rumah Sdr. Syahbudin (Ketua Tim Penuntut Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar HGU PT. BDAM) RT 06 Kel. Jahab Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dengan tuntutan Membayar sanksi adat dengan uang senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Restorasi : Membayar biaya ritual sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) , Ritual untuk meminta ampun maaf kepada roh-roh leluhur, roh-roh pengiring dan roh-roh penguasa alam semesta agar bisa menahan murka sehingga tidak terjadi pertumpahan darah atau bencana-bencana sosial lainnya.	1 kejadian	Pihak Kepolisian Polres Kutai Kartanegara melakukan negosiasi untuk melepaskan 4 orang yang telah disandera oleh warga. Setelah upaya Persuasif/Negosiasi tidak berhasil maka Personil Polres Kukar melakukan Tindakan Kepolisian dalam kegiatan tersebut mendapatkan perlawanan dari Tim Penuntut Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar HGU PT. BDAM sehingga Polres Kukar mengamankan 3 Orang Warga yang tergabung Tim Penuntut Hak Masyarakat Hukum Adat Lingkar HGU PT. BDAM karena melakukan perlawanan terhadap Personil Polres Kukar dengan identitas; 1) Ahmadi, Laki - laki, 45 Tahun, Jln Kebun Sari Desa Margahayu RT 03 Kec. Loa Kulu. 2) Jamlus, Laki - laki , 49 Tahun, Alamat Jln Poros Tenggarong Kota Bangun Km 18 RT 11 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong. 3) Ryan Sofian, Laki - laki , 44 Tahun, Alamat Jln Senyur RT 35 Kel. Loa Bahu Kec. Sungai Kunjang Samarinda. ketiga Orang tersebut diamankan di Mapolres Kukar guna proses hukum lebih lanjut.
	Mediasi Pencemaran Limbah yang mengakibatkan Kematian Masal Kerang Dara di Muara badak	1 kejadian	Rapat Mediasi terkait Pencemaran Limbah yang mengakibatkan Kematian Masal Kerang Dara di Kec. Muara Badak dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2024 di Ruang rapat Kantor Camat. Yang dihadiri Camat Muara Badak (Arfan S. Sos), Kapolsek Muara Badak (Iptu Gatot Siswanto S. Sos), Koramil Muara Badak (Serma Mashudi), DPRD Kab. Kukar (H. Muh. Hidayat), Kepala desa Muara Badak Ilir (Sudarmin), kepala desa Tanjung Limau (Suryandi), DLHK Kukar (Lalu

No	KEJADIAN KONFLIK	JUMLAH	LANGKAH PENANGANAN
			Riyal Hadi, Rido Basuni, Abd Hamid Budiman), DKP Kukar (Andi Nuriawan dan Wahib), Pos Lanal Muara Badak (Sertu Chandra), Pos Polairud Muara Badak (Aipda Agung. S), Ketua PABPDSI Muara Badak (Iskandar) Relation PHSS (Ardiansyah), Enviromental PHSS (Joko Purnomo), Enviromental PHSS (Sigit Hariadi), HSE Drilling PHSS (Pinain Millo), Ketua Budidaya kerang Dara Kec. Muara Badak (Said) beserta ± 50 Anggota. Menurut Said - Ketua Budidaya Kerang Dara sekitar 1 bulan yang lalu para budidaya kerang sudah banyak yang mengeluh bahwa banyaknya kerang dara yang mengalami kematian dan setelah itu banyak terjadi kematian masal pada kerang dara di Muara Badak yang diakibatkan oleh limbah yang diduga dari Pengeboran Sumur RIG di Desa. Tanjung Limau. Selama 5 tahun ini tidak pernah terjadinya kematian masal kerang dara di wilayah Muara badak, dan pada saat ini setelah kami selidiki kami menduga adanya pencemaran limbah dari pengeboran sumur RIG yang sengaja tanggulnya di jebol di daerah Tanjung Limau. Pihak Pertamina PHSS mengakui adanya 1 tanggul dari 3 tanggul yang jebol, dan pihaknya telah mengambil sampel air dilokasi tercermar. dan disepakati akan dilakukan rapat kembali pada tanggal 6/7 Januari 2025.

**Rekapitulasi Data
Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024**

No	Penanganan Konflik Sosial	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Pemantauan Orang Asing / Tenaga Kerja Asing (Rakor dan Monitoring/Sidak)													0
2	Penanganan Tindak Kriminal pemicu Konflik SARA				2									2

No	Penanganan Konflik Sosial	Bulan												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
3	Penanganan Prostitusi dan penyakit masyarakat													0
4	Penanganan Kepegawaian ASN/THL/Staf Desa/Kel Kab. Kutai Kartanegara													0
5	Penanganan Konflik Antar Umat Beragama						1							1
6	Penanganan (Mediasi) Konflik Hubungan Industrial													0
7	Mediasi tuntutan masyarakat atas pelayanan Publik (PLN/PDAM dll)							1						1
8	Penanganan Konflik Masyarakat dengan Perusahaan													-
	- Melibatkan Ormas/LSM													-
	- Hanya Kelompok Masyarakat						2	1		1			1	5
9	Penanganan Konflik Peningkatan Suhu Politik													0
10	Deradikalisme Penanggulangan Paham Radikal													
11	Penanganan Jaringan Teroris dan organisasi radikal													0
12	penanganan konflik lahan (SDA) atas klaim antar kelompok masyarakat													0
13	Pemantauan dan Penggalangan Napiter													0
14	Penanganan Konflik Pemerintah dengan perusahaan / pengusaha									1				1
15	Penanganan yang mengarah pada konflik SARA													0
16	Rakor Tim Pakem Kukar													0
17	Rakor Penanganan Konflik													
	- Politik													0
	- Lahan SDA / Pertambangan													0
	- Kewaspadaan													0
	- Sosial Budaya												1	1
	- Ketenaga Kerjaan												1	1
Jumlah Penanganan Konflik Sosial		0	0	0	1	0	3	2	0	2	0	0	3	11

**Rekapitulasi Data Penanganan Aspirasi Politik
di Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024**

No	Penanganan Aspirasi Politik	Bulan (kali)												Jumlah
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Sengketa Partai Politik dan Pemilu	1					1		1	1				4
Jumlah Penanganan Aspirasi Politik		1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	4

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis III sebagaimana diatas, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wasbang dan Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2022	2023	2024
Persentase Aparatur dan Masyarakat yang Memiliki Pemahaman Wasbang	1,99%	1,64%	2,19%	3,12%
Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud	1,33%	1,25%	1,77%	2,06%

Dari 2 (dua) indikator tersebut diatas, semuanya melebihi dari target yang telah ditetapkan dan meningkat dari tahun sebelumnya, berikut analisis dari kedua indikator tersebut :

a. Indikator I : Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan adalah cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan ideologinya, serta cita-citanya yang diorientasikan untuk memperkokoh dan menjaga persatuan dan ketahanan bangsa dengan tujuan dan sasaran wawasan kebangsaan sebagai berikut :

1. Bangsa yang kuat, rukun bersatu, berdaya saing tinggi dan sejahtera
2. Terjaganya sejarah kebangsaan indonesia dan cinta NKRI
3. Revitalisasi dan reaktualiasi nilai nilai pancasila
4. Secara khusus meredam berkembangnya penonjolan primordialisme sempit, kesukuan, kedaerahan dan mencegah disintegrasi bangsa
5. Meningkatkan kualitas penangkal dunia maya demi lestarnya bangsa.

Dari uraian di atas dapat terlihat bahwa salah satu tugas Badan Kesbangpol adalah pembentukan karakter kebangsaan kepada aparaturnya dan masyarakat demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa termasuk didalamnya pencegahan konflik di masyarakat dan golongan. Untuk itu pada indikator ini Badan Kesbangpol telah melakukan berbagai upaya penyuluhan dan sosialisasi masalah wasbang dengan kelompok sasaran Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Aparatur Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Pelajar dan Mahasiswa dengan harapan mereka bisa memahami dan melaksanakan terkait dengan wawasan kebangsaan

Dalam hal ini Badan Kesbangpol telah melaksanakan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator tersebut dengan kegiatan yang dilakukan di 20 kecamatan yaitu Pembinaan Pembauran Masyarakat, Pembinaan Bela Negara dan Karakter Kebangsaan, serta sosialisasi FPK dan KPU kabupaten kutai kartanegara menuju pemilu damai dan demokratis. Dalam hal pencapaian pada indikator ini yang merupakan hal mendasar adalah pada tingkat kehadiran dan pemahaman peserta pada kegiatan pembinaan dan penyuluhan.

Indikator II : Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud

Perkembangan teknologi informatika saat ini telah menampilkan dua sisi yang berbeda disaat bersamaan, kemajuan teknologi telah membuat kehidupan semakin mudah dan canggih, disisi lain juga berdampak buruk bagi kehidupan generasi muda saat ini. Krisis ekonomi sebagai dampak globalisasi yang terjadi telah menjajah kalangan menengah kebawah yang tersisih dari pergeseran zaman, hal tersebut banyak merubah tatanan kehidupan sosial dan budaya dalam masyarakat, sehingga menjadi ancaman serius terhadap etika dan moral bangsa, semua tercermin dari meningkatnya tindakan penyakit masyarakat

Melihat pokok permasalahan diatas Badan Kesbangpol berupaya untuk menekan jumlah kasus penyakit masyarakat yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara dari seluruh upaya yang telah dilakukan secara maksimal ditargetkan pada tahun 2020 jumlah kasus bisa turun hingga 205 kasus karena dari tahun 2012 jumlah 186 kasus terus menurun hingga pada 2013 menjadi 161, namun pada tahun 2014 ternyata makin meningkat hingga 170 kasus dan tahun 2015 makin meningkat menjadi 224 kasus selanjutnya pada tahun 2016 meningkat lebih ekstrim menjadi 713 kasus dan pada tahun 2017 telah menurun menjadi 469 kasus kemudian pada tahun 2018 menurun lagi menjadi 359 kasus dan pada tahun 2019 menurun sedikit menjadi 318 kasus, namun belum sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator ini gagal tercapai dari target 205 kasus pada 2019, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan ditemukan bahwa peningkatan kasus yang sangat tinggi ini merupakan kegagalan pencapaian dalam hal penurunan jumlah kasus penyakit masyarakat, namun jika dilihat lebih rinci bahwa kasus yang paling tinggi adalah narkoba, hal ini juga disebabkan oleh adanya operasi dari pihak kepolisian dengan sandi “Operasi Bersinar” sehingga pada tahun 2018 dan 2019 seluruh kejahatan narkoba dapat dibongkar, dengan harapan pada tahun berikutnya jumlah kasus ini akan berkurang. Untuk kasus lain terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sehingga kegagalan pencapaian ini merupakan bahan evaluasi agar pada tahun berikutnya bisa ditekan lagi dengan peningkatan penyuluhan serta kerjasama dengan pihak terkait, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesbangpol adalah kasus Narkoba

yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya kegiatan yang dilaksanakan masih belum menyentuh kepada sasaran yang ingin diberikan penyuluhan, disamping anggaran yang minim juga karena kebanyakan pelaku kasus tersebut adalah para pemuda dan walaupun telah dirangkul namun karena terputusnya program pembinaan dan kurang luasnya cakupan peserta di tiap kecamatan dan desa/kelurahan, walaupun tiap kegiatan sudah dilaksanakan, dalam kasus ini perlu pendalaman lagi setelah pelaksanaan penyuluhan agar hasil yang didapat lebih baik dengan turunnya angka kriminalitas. Kasus yang sangat tinggi terdapat pada Narkoba, inilah yang menjadi faktor utama dalam pemberantasan kasus penyakit masyarakat dan sesuai permendagri nomor 21 tahun 2013 Badan Kesbangol menjadi fasilitator dalam pencegahan peredaran narkoba. Berbagai upaya telah dilakukan Badan Kesbangpol sebagai berikut :

1. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada para pelajar khususnya dan kalangan masyarakat pada umumnya tentang bahaya narkoba dengan berkerjasama dengan BNK dan Dinas Kesehatan sebagai narasumber. Dan setelah penyuluhan dilaksanakan Tes Urin kepada para peserta dan hasil yang didapat semuanya menunjukkan negative dalam pemakaian narkoba.
2. Pelaksanaan Tes Urin bagi para aparaturnya Badan Kesbangpol dalam 2 tahun berturut-turut, dengan harapan para aparaturnya bisa terbebas dari narkoba.
3. Menghimbau kepada seluruh OPD untuk dapat melaksanakan Tes Urin bebas narkoba.

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2022 – 2024

No.	Jenis Kriminal	2022	2023	2024
1	Narkoba	178	239	164
2	Pembunuhan	3	-	1
3	Kejahatan Seksual	3	2	25
4	Penganiayaan	32	15	9
5	Pencurian	36	16	46
6	Eksplotasi Anak Bawah Umur	25	15	25
7	Premanisme	5	6	10
	JUMLAH	282	293	280

Dari data diatas jumlah kasus yang terjadi pada tahun 2024 sebanyak 280 kasus, telah terjadi peningkatan sebanyak 13 kasus dari tahun 2023 dengan target jumlah kasus sebanyak 293 kasus, penurunan kasus ini merupakan suatu capaian yang cukup baik, untuk kasus lain terjadi penurunan dari tahun sebelumnya sehingga kegagalan pencapaian ini merupakan bahan evaluasi agar pada tahun berikutnya bisa ditekan lagi dengan peningkatan penyuluhan serta kerjasama dengan pihak terkait, namun yang akan menjadi fokus dari Badan Kesbangpol adalah kasus Narkoba yang masih tinggi, dengan lebih meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi dan bentuk pencegahan lainnya.

Selain penyakit masyarakat, dalam hal ini juga dilaksanakan kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama dan fasilitasi pelaksanaan Rapat Koordinasi FKUB se – Kaltim serta sosialisasi FKUB dan BAWASLU kabupaten kutai kartanegara menuju pemilu damai dan demokratis

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis IV sebagaimana diatas, diukur dengan 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah dan Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi, Gambaran pencapaian penetapan kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV

Indikator Sasaran	Target	Realisasi		
		2022	2023	2024
Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,27%	11,90%	14,76%	17,67%
Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi	11,40%	8,8%	9,8%	11,1%

Dari 2 (dua) indikator tersebut diatas, pada indikator persentase ormas yang tertib administrasi yang belum mencapai target, karena tidak tercapainya ormas yang difasilitasi pada tahun 2024, sementara 1 (satu) indikator telah mencapai target yang ditetapkan bahkan melebihi, sehingga secara keseluruhan pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini telah berhasil, berikut analisis dari dua indikator tersebut :

a. Indikator I : Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah

Dengan melihat data Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu periode 2015 – 2024 yang tertinggi terdapat pada Pemilihan Legislatif dan Presiden Serentak tahun 2024 sebesar 83,84 % karena banyak kepentingan politik pada proses pemilihan ini, sedangkan pada pemilu lain cenderung menurun dan secara keseluruhan tidak ada yang mencapai target yang ditetapkan yaitu 70 % dimana menurunnya Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih atau dengan kata lain jumlah golput (Pemilih yang tidak menggunakan hak pilih) semakin meningkat. Maka Badan Kesbangpol harus mengkaji untuk mencari kantong-kantong daerah yang pontensi Pemilih yang tidak

menggunakan hak pilih tinggi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya angka partisipasi pemilih :

1. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi (apatis)
2. Kurangnya sosialisasi tentang Pemilu ke pelosok kecamatan dan desa/kelurahan
3. Metode sosialisasi yang belum atraktif dan belum menyetuh kepada para pemilih potensial (pemilih pemula)
4. Kekecewaan masyarakat terhadap produk hasil pemilu sebelumnya

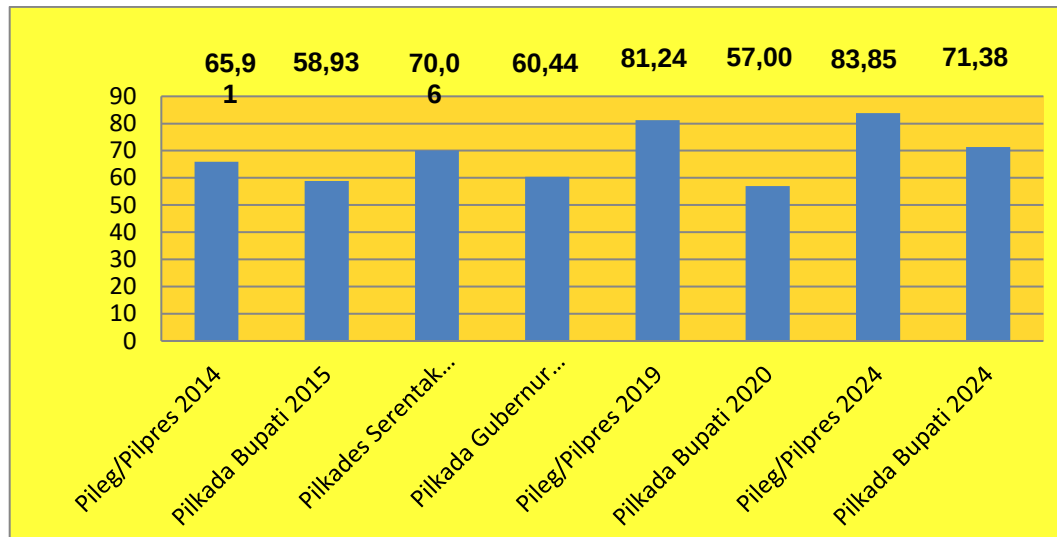
Inilah faktor penyebab masih terdapat rendahnya angka partisipasi pemilih sebagai penunjang keberhasilan berdemokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Badan Kesbangpol telah berupaya maksimal dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk Pemilu berikutnya. Dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan Badan Kesbangpol telah berhasil mencapai target yang ditetapkan, namun secara keseluruhan tingkat partisipasi ini masih baik karena masih diatas 50% yang berarti capaian ini harus ditingkatkan lagi.

Untuk lebih jelas, berikut ini disajikan data dan grafik Partisipasi Pemilih dalam menggunakan Hak pilihnya dalam Pemilu sebagai berikut :

**Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada
Tahun 2015-2024**

INDIKATOR	2015	2016	2018	2019	2020	2024	2024
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Pilbup : 58,93%	Pilkades: 70,06%	Pilgub : 60,44	Pileg/Pilpr e 81,24	Pilbup 57,00	Pileg/Pilpr e 83,84	Pilbup 71,38

GRAFIK PARTISIPASI PEMILIH DALAM PEMILU DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.362.024.250,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.362.024.250,00 atau 100,00 %. Pada tahun 2024 ini pemberian hibah berupa bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan 2 (dua) tahapan, yaitu tahap pertama diberikan kepada Partai Politik hasil Pemilu tahun 2019 dengan rincian 7/12, nilai 7/12 merupakan bilangan pembagi, dari jumlah bulan periode 2019-2024 yang berakhir pada tanggal 14 Agustus 2024 dan dihitung dari Januari s/d Juli 2024. Kemudian tahap kedua diberikan kepada Partai Politik hasil Pemilu tahun 2024 dengan rincian 5/12, nilai 5/12 merupakan bilangan pembagi, dari jumlah bulan periode 2024-2029 yang dimulai pada bulan Agustus 2024 dan dihitung dari Agustus s/d Desember 2024.

Secara keseluruhan untuk parpol berdasarkan hasil evaluasi dilihat bahwa masih ada bendahara parpol yang tidak cermat dalam pertanggungjawaban dana bantuan yang dikelola, hal ini dapat dilihat dari adanya temuan BPK terkait laporan pertanggungjawaban masing-masing parpol, selain itu Badan Kesbangpol akan terus memberikan penyuluhan dan pendampingan terhadap parpol tentang mekanisme dan persyaratan administrasi kegiatan agar bisa tertib.

**DATA PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
PERIODE 2019-2024**

NILAI PER SUARA = RP. 3.800,-

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA PEMILU 2019	NILAI PERIODE 2019	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	5	34.286	7/12 x 130.286.800	76.000.650	Lengkap/Realisasi
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7	46.667	7/12 x 177.334.600	103.445.200	Lengkap/ Realisasi
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	7	45.361	7/12 x 172.371.800	100.550.250	Lengkap/ Realisasi
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	13	95.345	7/12 x 362.311.000	211.348.100	Lengkap/ Realisasi
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	2	20.373	7/12 x 77.417.400	45.160.150	Lengkap/ Realisasi
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3	23.250	7/12 x 88.350.000	51.537.500	Lengkap/ Realisasi
7.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	14.340	7/12 x 54.492.000	31.787.000	Tidak Realisasi
8.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1	16.764	7/12 x 63.703.200	37.160.200	Lengkap/ Realisasi
9.	PARTAI AMANAT NASIONAL	5	34.071	7/12 x 129.469.800	75.524.050	Lengkap/ Realisasi
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	1	12.410	7/12 x 47.158.000	27.508.850	Lengkap/ Realisasi
JUMLAH		45	342.867	1.302.894.600	760.021.950	

**DATA PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN
PERIODE 2019-2024**

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA PEMILU 2024	NILAI PERIODE 2024	NILAI BANTUAN	KETERANGAN
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	29.966	5/12 x 113.870.800	47.446.200	Lengkap/Realisasi
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	5	59.949	5/12 x 227.806.200	94.919.250	Lengkap/ Realisasi
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	16	145.613	5/12 x 553.329.400	230.553.900	Lengkap/ Realisasi
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	9	75.106	5/12 x 285.402.800	118.917.800	Lengkap/ Realisasi
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT	4	33.849	5/12 x 128.626.200	53.594.250	Lengkap/ Realisasi
6.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	2	19.074	5/12 x 72.481.200	30.200.500	Lengkap/ Realisasi

7.	PARTAI AMANAT NASIONAL	4	36.731	5/12 x 139.577.800	58.157.400	Lengkap/ Realisasi
JUMLAH		45	400.288	1.521.094.400	633.789.300	

Dari data diatas menunjukkan bahwa pada indikator ini telah ditetapkan target 100% dan telah tercapai 100%, meskipun telah lengkap hal ini perlu terus diawasi lagi dalam penggunaan agar tidak terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan kegiatan dan anggaran yang didapat oleh Parpol. Agar parpol dan ormas bisa tertib dalam administrasi, maka Badan Kesbangpol akan melaksanakan Bimtek bagi Bendahara Parpol dan Ormas pada tahun berikutnya.

b. Indikator II : Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi

Dalam indikator yang kedua ini, digambarkan Prosentase Ormas Yang Tertib Administrasi, pada indikator ini telah ditetapkan target 11,40% dengan realisasi 11,1%, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, maka persyaratan pendaftaran ormas telah diperketat sehingga hanya ormas yang sudah memiliki cabang induk di Kabupaten yang bisa mendaftarkan ormasnya dan pada tahun ini ormas yang mendaftar sama dengan tahun 2022 sebanyak 17 ormas dan 21 ormas pada tahun 2023, meskipun demikian, ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan sebanyak 30 ormas, selain itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 82/PUU-XI/2013 tanggal 22 Oktober 2014 disebutkan bahwa ormas diperbolehkan untuk tidak terdaftar, yang membuat ormas yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak melakukan pendaftaran ormasnya dan Bdan Kesbangpol memiliki tugas untuk tetap memonitoring dan mengawasi keberadaan ormas yang belum terdaftar di setiap terdaapt kegiatan dari ormas tersebut, ini menunjukan bahwa tingkat partisipasi masyarakat yang berorganiasi mengalami peningkatan. Sehingga bisa tertib dalam administrasi. Dan mulai pada tahun 2018 pendaftaran ormas telah melalui Kemendagri melalui Ditjen Polpum.

**Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar
tahun 2018 – 2024**

NO	ORMAS	TAHUN (JUMLAH)						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023
1.	ORMAS	3	4	12	10	8	14	2
2.	OKP	-	-	-	-	4		-
3.	LSM	-	2	-	2	-	-	-
4.	PAGUYUBAN	2	3	-	-	-	-	-
5.	AGAMA	-	1	2	1	3	-	-
6.	PROFESI	2	-	-	-	-	1	-
7.	LEMBAGA ADAT	1	-	-	-	-	1	-
8.	YAYASAN	-	2	2	4	2	5	5
	JUMLAH	8	12	16	17	17	21	27

**Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar Tahun 2024
(berdasarkan sebaran di kecamatan)**

No	Kecamatan	Ormas	OKP	LSM	Paguyuban	Lemb. Adat	Profesi	Yayasan	Jumlah
1	Marangkayu	-	-	-	-	-	-	-	0
2	Muara badak	-	-	-	-	-	-	-	0
3	Samboja	2	-	-	-	-	-	-	2
4	Muara Jawa	-	-	-	-	-	-	-	0
5	Sanga-sanga	1	-	-	-	-	-	-	1
6	Anggana	-	-	-	-	-	-	-	0
7	Loa Janan	-	-	-	-	-	-	-	0
8	Loa Kulu	-	-	-	-	-	-	-	0
9	Tenggarong Seberang	-	-	-	-	-	-	-	0
10	Tenggarong	19	-	-	-	-	-	4	23
11	Sebulu	-	-	-	-	-	-	-	0
12	Muara Kaman	-	-	-	-	-	-	1	1
13	Kota bangun	-	-	-	-	-	-	-	0
14	Muara Wis	-	-	-	-	-	-	-	0
15	Muara Muntai	-	-	-	-	-	-	-	0
16	Kenohan	-	-	-	-	-	-	-	0
17	Kembang janggut	-	-	-	-	-	-	-	0
18	Tabang	-	-	-	-	-	-	-	0
	Jumlah	22	0	0	0	0	0	5	27

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka

Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen PerencanaanStrategis

Perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini DenganTarget Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2021-2026)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2024
Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	64,50 Nilai	42,83	66,40%
Penurunan Jumlah Konflik dan Gejolak	17 kejadian	14 kejadian	100%
Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan dan Pancasila Serta Ormas	3,92 %	5,2%	100%
Persentase Pemahaman Aparatur dan Masyarakat Terhadap Demokrasi	5,71 %	6,84%	100%

PENGUKURAN KINERJA DAN KEUANGAN SASARAN STRATEGIS BADAN KESBANGPOL

Sasaran Strategis I :				Program :		
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	88 Nilai	70,98 Nilai	80,66	16.559.162.468	14.371.313.864	86,79
Sasaran Strategis II :				Program :		
Meningkatnya Keamanan, Kenyamanan dan Ketertiban Masyarakat				Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial		
Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100	3.063.010.000	2.715.249.193	88,65
Sasaran Strategis III :				Program :		
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Wawasan Kebangsaan dan Pancasila serta Ormas				Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		
Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	1,99%	3,12%	156,78	8.778.680.000	7.093.473.122	80,80
				Program :		
				Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		
Persentase Aparatur dan Masyarakat Yang Memiliki Pemahaman Ketahanan Ekososbud	1,33%	2,06%	154,89	2.603.122.200	2.093.162.395	74,91
Sasaran Strategis IV :				Program :		
Meningkatnya Kualitas Demokrasi di Daerah				Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	%
Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,27%	17,67%	123,83	75.135.281.911	70.936.300.063	94,41
				Program :		
				Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		
Persentase Ormas Yang Tertib Administrasi	11,40%	11,1%	97,37	700.000.000	599.540.000	85,65

TABEL T-C.30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KESBANGPOL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

N O	INDIKATOR	SPM/STAND AR NASIONAL	IK K	SATUAN	TARGET RENSTRA					REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATAT AN ANALISI S
					TAHU N 2025	TAHU N 2026	TAHU N 2027	TAHU N 2028	TAHU N 2029	TAHU N 2023	TAHU N 2024	TAHU N 2025	TAHU N 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN:													
	Indikator Tujuan:													
1	Indeks Harmoni Indonesia			Skor	88,3 0	88,3 1	88,3 2	88,3 3	88,3 4	77,08	88,29	88,3 0	88,3 1	target tercapa i
	Indikator Sasaran (IKU perangkat daerah):													
1	Persentase penyelesaian konflik			Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	target tercapa i
2	Indeks Partisipasi Politik			Skor	85,3 3	86,3 6	87,0 4	89,4 6	91,4	83	83,07	85,33	86,3 6	target tercapa i
II	INDIKATOR PROGRAM:													

1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Nilai	76	77	78	79	80	70,98	75,34	76	77	target tercapai
2	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik			Persen	6,22	6,41	6,59	6,77	6,95	5,71	6,04	6,22	6,41	target tercapai
3	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			Persen	2,95	3,15	3,35	3,55	3,75	2,19	2,76	2,95	3,15	target tercapai
4	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan			Persen	1,98	2,13	2,29	2,45	2,61	1,77	1,82	1,98	2,13	target tercapai

5	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		Persen	18,45	23,30	28,15	33,00	37,86	9,80	13,59	18,45	23,30	target tercapai
6	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan		Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	target tercapai
III	INDIKATOR KEGIATAN:												
1	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	target tercapai
2	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri		Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	target tercapai
3	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	target tercapai

4	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya			Dokumen/Bulan	12	12	12	12	12	5	5	12	12	target tercapai
5	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Dokumen	30	30	30	30	30	21	27	30	30	target tidak tercapai

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, Kajian terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dan Kajian terhadap Renstra maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel berikut :

Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Kualitas demokrasi daerah, keamanan dan ketertiban masyarakat yang belum optimal	Masih munculnya konflik dan gejala di masyarakat	1. Analisis yang belum maksimal terhadap dampak kebijakan pemerintah yang kontra dengan harapan masyarakat 2. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah 3. Masih lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat terkait peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
2		Kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta isu toleransi 2. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat 3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat

			4. Beragamnya suku yang memunculkan ego kesukuan 5. Kurangya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat 6. Masih berkembangnya ajaran paham radikalisme di kalangan masyarakat
3		Menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara	1. Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat dalam bidang politik 2. Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat tentang kehidupan demokrasi 3. Kurangnya pemahaman masyarakat dalam berorganisasi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku 4. Masih terdapat parpol dan ormas yang belum memahami tentang administrasi penggunaan dana bantuan dari pemerintah

Berdasarkan pemetaan permasalahan diatas, akan kami sampaikan juga data pendukung terhadap permasalahan tersebut sebagai berikut :

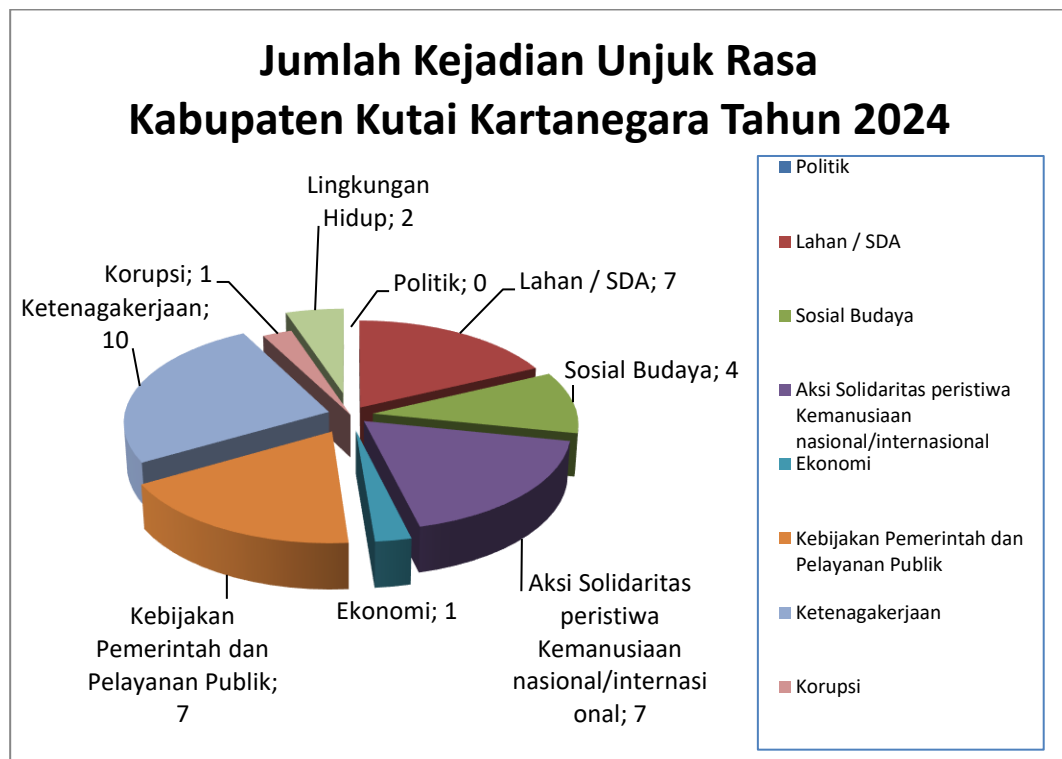
1. Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol

- a. Pelayanan administrasi perkantoran memang telah sepenuhnya dilaksanakan, namun masih terdapat beberapa pelayanan yang belum bisa dilaksanakan, sehingga hanya yang bersifat prioritas yang tetap dilaksanakan.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana aparatur sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, berdasarkan data dari Pengurus Barang hanya terdapat 83 % sarana dan prasarana dalam kondisi baik yang dapat digunakan, sehingga perlu penambahan dan pemeliharaaa sarana dan prasarana

- c. Masih kurangnya kompetensi SDM aparatur, hal ini karena belum ada pendidikan dan pelatihan baik teknis dan fungsional yang memadai bagi aparatur Badan Kesbangpol
- d. Predikat akuntabilitas kinerja Badan Kesbangpol masih perlu ditingkatkan berdasarkan data sebagai berikut :

Predikat Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol				
2019	2020	2021	2022	2023
BB	BB	A	AA	BB

2. Masih tingginya angka konflik dan gejolak di masyarakat



3. Data kasus penyakit masyarakat

Pantauan Kasus Penyakit Masyarakat Tahun 2022 – 2024

No.	Jenis Kriminal	2022	2023	2024
1	Narkoba	178	239	164
2	Pembunuhan	3	-	1
3	Kejahatan Seksual	3	2	25
4	Penganiayaan	32	15	9
5	Pencurian	36	16	46
6	Eksplorasi Anak Bawah Umur	25	15	25
7	Premanisme	5	6	10
	JUMLAH	282	293	280

4. Menurunnya tingkat partisipasi politik masyarakat

a. Data Ormas Kabupaten Kutai Kartanegara

**Data Organisasi Kemasyarakatan Terdaftar
tahun 2019 – 2024**

NO	ORMAS	TAHUN (JUMLAH)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	ORMAS	4	12	10	8	14	22
2.	OKP	-	-	-	4		
3.	LSM	2	-	2	-	-	-
4.	PAGUYUBAN	3	-	-	-	-	-
5.	AGAMA	1	2	1	3	-	-
6.	PROFESI	-	-	-	-	1	-
7.	LEMBAGA ADAT	-	-	-	-	1	-
8.	YAYASAN	2	2	4	2	5	5
	JUMLAH	12	16	17	17	21	27

b. Data Partisipasi Pemilih Kabupaten Kutai Kartanegara

Data Tingkat Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu dan Pemilukada

Tahun 2015-2024

INDIKATOR	2015	2016	2018	2019	2020	2024	2024
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu	Pilbup : 58,93%	Pilkades: 70,06%	Pilgub : 60,44	Pileg/Pilpr e 81,24	Pilbup 57,00	Pileg/Pilpr e 83,84	Pilbup 71,38

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, Politisasi Nilai-Nilai Agama, dan Menepisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum.

1) Potensi Kerawanan Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara.

Karakteristik Kabupaten Kutai Kartanegara yang dihuni oleh masyarakat yang heterogen, mempunyai potensi kerawanan sosial, politik dan kewilayahan, yang dapat mengarah pada konflik sosial yang berdimensi vertikal dan horisontal. Kondisi kemajemukan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang rawan konflik, implementasi otonomi daerah yang belum konsisten, kebijakan publik yang belum memuaskan masyarakat, kesenjangan sosial ekonomi yang masih signifikan, makin rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum, serta pelanggaran HAM mendorong munculnya tirani sosial/massa yang mengarah pada anarkhisme.

2) Politisasi Nilai-Nilai Agama

Masih berakarnya politisasi nilai-nilai agama sebagai bagian dari pertentangan kepentingan politik dan kekuasaan masih terjadi pada masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama beberapa tahun terakhir. Iklim kebebasan telah membuat kelompok primordial menegaskan keberadaan di dalam masyarakat, bahkan dengan tidak ragu-ragu menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.

3) Menipisnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Politik dan Hukum

Pada saat proses politik yang demokratis dan praktek hukum yang berkeadilan justru sangat diperlukan pada saat seperti sekarang ini, namun secara bersamaan terjadi pula penipisan kepercayaan masyarakat luas terhadap lembaga politik dan hukum. Perasaan diperlakukan tidak adil dan sikap-sikap sinis dan pesimisme yang meluas, memunculkan berbagai ungkapan kejengkelan dan ejekan terhadap dunia peradilan, antara lain berupa tuduhan "mafia peradilan" kepada dunia kehakiman, Kejaksaan dan kepolisian sebagai tritunggal penegak hukum Indonesia. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang pada masa lalu kurang diakui peranannya, dewasa ini mulai menunjukkan peran yang baik dalam memberdayakan sektor masyarakat menuju ke arah terbentuknya masyarakat modern (*civil society*) yang tangguh.

4) Perkembangan Dinamika Politik Masyarakat

Seiring dengan perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Terkait dengan dinamika politik, saat ini masyarakat dapat menyikapi setiap perkembangan yang ada secara cerdas dan bijaksana, proaktif dan bertindak positif.

5) Perubahan Paradigma Pelayanan Publik.

Dengan adanya perubahan perundang-undangan, terjadi pergeseran fungsi utama Pemerintah Daerah yang semula Sebagai “Promotor Pembangunan” berubah menjadi “Pelayan Masyarakat”. Perubahan diatas sejalan paradigma good governance yang memberikan tekanan pada manajemen pemerintahan, termasuk manajemen pelayanan publik. Pemerintah tidak lagi berposisi sebagai penguasa dengan sifat hubungan hierarkis dengan masyarakat, melainkan sebagai mitra yang berkedudukan heterarkhis dengan komponen lainnya (sektor swasta dan masyarakat).

6) Sinkronisasi Kebijakan Pusat di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam mewujudkan harmoni sosial masyarakat, Pemerintah berupaya meningkatkan berbagai perangkat perundang-undangan/ Peraturan yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat. Peraturan-peraturan tersebut baik terkait dengan program dan kegiatan maupun forum-forum masyarakat maupun instansi terkait yang membawa konsekuensi ke daerah untuk memfasilitasi kebijakan tersebut. Peraturan-peraturan tersebut antara lain pembentukan tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Peluang

Berdasarkan tantangan utama di atas, serta sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 41 tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara, maka diperkirakan memiliki peluang sekaligus memungkinkan untuk melaksanakan upaya-upaya yang terkait dengan :

1) Peningkatan Persatuan dan Kesatuan

Peluang dan upaya ini ditujukan untuk menyepakati makna penting persatuan dan kesatuan bangsa dalam konstelasi politik yang sudah berubah, yang dapat dilakukan dengan kegiatan pokok membangun dan melaksanakan sistem deteksi dini atau *early warning system* untuk merespon berbagai persoalan konflik sosial politik, membangun dan memperluas mekanisme dan jaringan kerjasama seluruh *stakeholders* bangsa untuk menyelesaikan berbagai persoalan konflik sosial politik, melaksanakan gerakan kampanye ataupun bentuk-bentuk advokasi lainnya secara serentak untuk meningkatkan komitmen yang utuh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, serta melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia.

2) Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Politik

Upaya ini ditujukan untuk mewujudkan kelembagaan yang lebih kokoh dan optimalisasi fungsi-fungsi dan hubungan antar lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, serta kemasyarakatan, sejalan dengan amanat konstitusi. Dalam kaitan ini, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Masyarakat memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas lembaga-lembaga penyelenggara Negara, utamanya lembaga legislatif daerah, memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik, memberdayakan dan menata lembaga-lembaga kemasyarakatan, mensosialisasikan perlunya mendukung keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan fungsi dan peran yang digariskan oleh konstitusi, serta melembagakan mekanisme kerjasama antar institusi negara dan antara institusi negara dan masyarakat dalam mendukung proses demokratisasi.

3) Pemulihan Wilayah Pasca Konflik

Stabilitas politik dan pasca konflik merupakan agenda penting bagi upaya mewujudkan proses demokratisasi, persatuan dan kesatuan bangsa, iklim usaha yang kondusif serta terjaganya ketertiban umum di daerah. Beberapa permasalahan yang perlu diantisipasi

terutama terkait dengan *excess* dan *dispute* yang potensial terjadi di beberapa daerah sebagai implikasinya. Hal ini memerlukan perhatian dan upaya-upaya terstruktur dalam proses pembinaan politik yang demokratis di tingkat lokal serta peningkatan wawasan kebangsaan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan itu, upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu tetap dipelihara.

4) Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat

Dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat, maka para *stakeholder* (Partai politik, tokoh politik, tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya) diharapkan untuk berperan lebih aktif dalam memberikan pemahaman politik kepada masyarakat. Penguatan dalam meningkatkan partisipasi politik melibatkan Partai Politik dan Tokoh Masyarakat

5) Peningkatan Budaya Multikultural dan Toleransi

Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara sangatlah beraneka ragam, termasuk didalamnya sistem religi atau sistem kepercayaan yang hidup dan diyakini oleh masyarakat. Dalam membangun sikap multikultural, maka upaya yang perlu dilakukan adalah meningkatkan pemahaman kepada masyarakat untuk saling menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleransi sosial tanpa membedakan antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain.

6) Peningkatan Sumber Daya Manusia Bakesbangpol

Dalam menunjang kinerja SDM Bakesbangpol, perlu upaya-upaya peningkatan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas dengan harapan meningkatnya kinerja aparaturnya Bakesbangpol yang handal dan profesional.

7) Peningkatan Anggaran

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya secara proporsional jumlah alokasi anggaran yang diperlukan dalam meningkatkan peran di area pembinaan tersebut.

8) Sarana dan Prasarana

Dengan cakupan area dan wilayah pembangunan kesatuan bangsa dan politik, maka upaya yang perlu dilakukan adalah dapat terpenuhinya sarana dan prasarana yang diperlukan dalam mendukung pembinaan dan pembangunan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi yang dimiliki serta visi, misi program Bupati dan Wakil Bupati, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

1. Penguatan Deteksi Dini dan Penanganan Konflik dan Gejolak di Masyarakat

Adanya Aspirasi atau harapan masyarakat yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah yang akan memicu terjadinya konflik dan gejolak di masyarakat yang bisa mengganggu stabilitas daerah. Diperlukan penguatan analisis hasil deteksi dini dan kesinambungan langkah koordinasi penanganan potensi terjadinya konflik dan gejolak di Masyarakat

2. Peningkatan Pemahaman Aparatur dan Masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi dapat menimbulkan ekses dekadensi moral yang bisa mengarah pada perubahan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara serta munculnya isu paham radikalisme di kalangan masyarakat, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara.

3. Peningkatan Kualitas Demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara

Dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan terkait Pemilu dan Organisasi Kemasyarakatan yang menerapkan kebijakan terbaru, diperlukan langkah penyesuaian dengan kondisi demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian partisipasi politik masyarakat yang telah ada melalui penciptaan iklim demokratis di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan berbagai upaya pendidikan politik bagi seluruh lapisan masyarakat

Berdasarkan isu-isu strategis diatas, Badan Kesbangpol akan menindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas sebagai berikut :

1. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial serta sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - b. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan serta sub kegiatan :
 - a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya serta sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - b. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
4. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan serta sub kegiatan :
- a. Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
5. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK, dengan kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik serta sub kegiatan :
- a. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - b. Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
 - c. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Untuk rumusan seluruh permasalahan beserta Langkah tindak lanjut tergambar pada tabel sebagai berikut :

2.4 Review Terhadap Rancangan RKPD

Pada RKPD tahun 2026 telah ditetapkan 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah 2026 dimana Badan Kesbangpol termasuk pada prioritas keempat yaitu “Penguatan Regulasi dan Tata Kelola yang Adaptif, Konsisten dan Implementatif” dan keenam yaitu “Penguatan Nilai-Nilai Tradisional serta Warisan Budaya melalui Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Sejak Dini”. Dalam rancangan awal ini perangkat daerah harus menjabarkan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dengan sasaran dan indikator dalam RPJMD yang akan diselaraskan dengan RENSTRA dan diturunkan dalam perencanaan tahunan dalam RENJA OPD, adapun prioritas pembangunan yang dilaksanakan Badan Kesbangpol di dalam rancangan RKPD 2026 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Prioritas 4 Penguatan Regulasi dan Tata Kelola yang Adaptif, Konsisten dan Implementatif

Prioritas 6 Penguatan Nilai-Nilai Tradisional serta Warisan Budaya melalui Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Sejak Dini

SASARAN DAERAH	INDIKATOR DAERAH	STRATEGI DAERAH	KEBIJAKAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Penataan dan Pengembangan Manajemen Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan Manajemen Organisasi dan Penguatan Koordinasi Perangkat Daerah	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga	Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah	14,75%

SASARAN DAERAH	INDIKATOR DAERAH	STRATEGI DAERAH	KEBIJAKAN DAERAH	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2026
				Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		
				Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	2,34%
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud	1,58%
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang tertib administrasi	14,40%

RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2025-2029 telah memuat program beserta pagu indikatif OPD dan setelah dilakukan perbandingan dengan hasil analisis kebutuhan pada Badan Kesbangpol pada tahun 2026 yang dilakukan sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan kegiatan

prioritas terutama kepada pemeliharaan situasi kondusif di dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara pasca pelaksanaan Pemilu Serentak tahun 2024, Pelaksanaan tugas Paskibraka, Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pancasila, Penguatan Forum-Forum Bentukan Pemerintah, dan Fasilitasi Pelaksanaan P4GN

Dari penjabaran rancangan RKPD tahun 2026 yang telah disesuaikan dengan hasil analisa kebutuhan OPD tersebut dijabarkan lagi menjadi kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026 berdasarkan pagu indikatif dimana terdapat perbedaan terkait perubahan kegiatan dan besaran pagu indikatif antara Rancangan Awal dan Rancangan yang disebabkan oleh acuan ketersediaan pagu indikatif, maka hal tersebut dapat dilihat pada penjelasan bagian tentang program dan kegiatan.

Proses ini sangat diperlukan untuk mendeteksi dini perencanaan yang baik dimulai dari RPJMD, RKPD, Renstra OPD hingga Renja OPD. Selengkapnya review terhadap rancangan RKPD tahun 2026 dapat disampaikan pada tabel berikut :

TABEL T-C.31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	RANCANGAN RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	12.671.487.070,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	11.735.028.605,00	
	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	750.000.000,00	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	400.000.000,00	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	450.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	150.000.000,00	

2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 lapora n	50.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 lapora n	50.000.000,00	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 lapora n	150.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 lapora n	100.000.000,00	
4	PENYELENGGARAA N WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Tengg arong, Panji	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokum en	50.000.000,00	PENYELENGGARAA N WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Tengg arong, Panji	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 dokum en	50.000.000,00	
5	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tengg arong, Panji	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 berita acara	50.000.000,00	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Tengg arong, Panji	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 berita acara	50.000.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 lapora n	8.374.176.479,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	20 lapora n	8.926.686.502,00	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tengg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	900 orang/ bulan	8.208.536.479,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tengg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji	900 orang/ bulan	8.761.046.502,00	

		arong, Panji	dan Tunjangan ASN				arong, Panji	dan Tunjangan ASN			
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lapora n	25.000.000,0 0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lapora n	25.000.000,0 0	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 lapora n	115.640.000, 00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	18 lapora n	115.640.000, 00	
9	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tengg arong, Panji	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokum en	25.000.000,0 0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tengg arong, Panji	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 dokum en	25.000.000,0 0	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 doku men	115.800.000, 00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	3 doku men	115.800.000, 00	
1 0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tengg arong, Panji	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokum en	25.000.000,0 0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tengg arong, Panji	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokum en	25.000.000,0 0	
1 1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 lapora n	50.000.000,0 0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 lapora n	50.000.000,0 0	

1 2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 lapora n	40.800.000,0 0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 lapora n	40.800.000,0 0	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 doku men	198.552.000, 00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 doku men	50.000.000,0 0	
1 3	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tengg arong, Panji	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	143 paket	148.552.000, 00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tengg arong, Panji	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	143 paket	-	
1 4	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Tengg arong, Panji	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	75 orang	50.000.000,0 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Tengg arong, Panji	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	75 orang	50.000.000,0 0	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 layana n	1.040.243.00 0,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 layana n	790.000.000, 00	
1 5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tengg arong, Panji	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tengg arong, Panji	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	5.000.000,00	
1 6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tengg arong, Panji	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 paket	100.000.000, 00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tengg arong, Panji	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 paket	100.000.000, 00	
1 7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tengg arong, Panji	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 paket	35.000.000,0 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tengg arong, Panji	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 paket	35.000.000,0 0	
1 8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tengg arong, Panji	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	50.000.000,0 0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tengg arong, Panji	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	50.000.000,0 0	

19	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kecamatan dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 laporan	800.243.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kecamatan dan luar daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 laporan	550.000.000,00	
20	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tengg arong, Panji	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 dokumen	50.000.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tengg arong, Panji	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2500 dokumen	50.000.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	786.688.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	100.000.000,00	
21	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tengg arong, Panji	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	634.688.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tengg arong, Panji	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 unit	-	Kendaraan Dinas Jabatan Esselon II
22	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tengg arong, Panji	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 unit	152.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tengg arong, Panji	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18 unit	100.000.000,00	utk peralatan elektronik dan kebutuhan PPID dan sarana kearsipan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	605.867.591,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 bulan	932.542.103,00	
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	1.000.000,00	

2 4	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lapora n	224.084.183,00	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 lapora n	224.084.183,00	Penambahan untuk pembiayaan rumah sekretariat BNNK dan Forum
2 5	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lapora n	380.783.408,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tengg arong, Panji	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 lapora n	707.457.920,00	utk kenaikan BPJS dan penyediaan jasa tenaga kebersihan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	800.160.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	420.000.000,00	
2 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tengg arong, Panji	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	70.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tengg arong, Panji	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 unit	70.000.000,00	
2 7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tengg arong, Panji	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit	110.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tengg arong, Panji	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 unit	110.000.000,00	

28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tengg arong, Panji	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 unit	40.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tengg arong, Panji	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 unit	40.000.000,00	
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tengg arong, Panji	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	580.160.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tengg arong, Panji	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	200.000.000,00	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3,15%	7.000.000.000,00	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	3,15%	5.560.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 dokumen	7.000.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	12 dokumen	5.560.000.000,00	
30	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3.500 orang	6.500.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	900 orang	5.400.000.000,00	Fasilitasi Kegiatan Paskibra ka, Fasilitasi FPK, JPM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pemuda Pemudi Lintas Suku

3 1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 kecamatan (loa kulu, sanga sanga, ma. Jawa, ma. Badak, kota bangu n darat, ma. Wis, sebulu , kenoh an, sambo ja barat dan tabang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	700 orang	500.000.000, 00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 kecamatan (loa kulu, sanga sanga, ma. Jawa, ma. Badak, kota bangu n darat, ma. Wis, sebulu , kenoh an, sambo ja barat dan tabang)	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200 orang	160.000.000, 00	Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di 20 kecamatan dan pembinaan karakter kebangsaan
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	6,41%	4.602.304.000,00	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	6,41%	4.002.304.000,00	

	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	12 doku men	4.602.304.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri	12 doku men	4.002.304.000,00	
3 2	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	20 kecam atan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.000 orang	1.000.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	20 kecam atan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.000 orang	500.000.000,00	kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, komunitas, ormas, aparatur desa/kelurahan dan RT

3 3	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	21 orang	3.352.304.000,00	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	21 orang	3.352.304.000,00	Fasilitasi kenaikan nilai per suara Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik hasil pemilu tahun 2024
3 4	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	24 laporan	250.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 laporan	150.000.000,00	Monitoring pemantauan dan perkembangan politik di daerah

	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	23,30 %	700.000.000,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	23,30 %	200.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30 dokumen	700.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30 dokumen	200.000.000,00	
35	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	800 orang	700.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 orang	200.000.000,00	Fasilitasi dan Pengawasan Ormas, serta Sosialisasi terhadap Ormas dan pelaksanaan ormas award dan koordinasi di ULA Kemendagri terkait SKT Ormas
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	2,13%	1.850.000.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI,		Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi	2,13%	800.000.000,00	

	SOSIAL, DAN BUDAYA		Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan			SOSIAL, DAN BUDAYA		Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan			
	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	5 dokumen	1.850.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	12 dokumen	800.000.000,00	
36	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.800 orang	1.500.000.000,00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	870 orang	600.000.000,00	Fasilitasi FKUB, BNNK, Kemah Pemuda Pemudi Lintas Agama, pelaksanaan assesment pengguna narkotika dan pembelian tes kit narkotika

3 7	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecam atan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	35 lapora n	350.000.000,00	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecam atan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 lapora n	200.000.000,00	Fasilitasi Ketahanan Ekonomi untuk sosialisasi pekat di bidang ketahanan ekonomi
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	2.340.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100%	1.250.000.000,00	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 doku men	2.340.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 doku men	1.250.000.000,00	

3 8	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 kecam atan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	800 orang	840.000.000,00	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 kecam atan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	220 orang	250.000.000,00	Fasilitasi FKDM, Monitoring TKA, Sosialisasi Radikalisme, Deteksi Dini
3 9	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 kecam atan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	50 dokum en	1.500.000.000,00	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 kecam atan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	30 dokum en	1.000.000.000,00	Fasilitasi Forkopimda dalam penanganan konflik dan gejala masyarakat
	JUMLAH				29.163.791.070,00	JUMLAH				23.547.332.605,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada bagian ini, Badan Kesbangpol tidak terdapat usulan program dan kegiatan yang masuk dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD, hal ini disebabkan tugas dan fungsi Badan Kesbangpol untuk pembentukan karakter masyarakat dan pencegahan konflik serta peningkatan partisipasi politik masyarakat dan dapat dilihat pada tabel berikut :

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan pedoman dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Perencanaan yang jelas dan sinergis harus selaras dengan Visi dan Misi serta memperhatikan potensi dan stabilitas daerah.

Rencana Strategis yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan disusun secara sistematis dan menurut skala prioritas sesuai kebutuhan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dokumen perencanaan tersebut disusun dan dirumuskan setiap lima tahun, memuat strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan dan diimplementasikan melalui Program dan kegiatan-kegiatan.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RPJMN 2025-2029 dengan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, diwujudkan melalui delapan Misi, yang dituangkan dalam delapan Asta Cita sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur

Dari misi pembangunan tersebut, terdapat 17 program prioritas untuk mencapai misi. Adapun program prioritas yang ditetapkan untuk mewujudkan visi RPJMN tahun 2025 – 2029 tersebut adalah

1. Swasembada pangan, energi, dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi Politik, hukum, dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan

14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

Dari program prioritas tersebut yang sesuai dengan tugas fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara adalah di program prioritas ke 3, 6, 16 dan 17.

RKP Tahun 2026 mengusung tema **“Peningkatan Produktivitas untuk Swasembada Pangan dan Energi, serta Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif”**

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Aspek Kajian	Capaian/Kon disi Saat Ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (Kewenang an OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi,	sih kurangnya pemahaman aparaturnya dan masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	Persentase aparaturnya dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan	rupakan Tupoksi Badan Kesbangpol Kab. Kukar	aturan perundang-undangan yang berlaku	1. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan paham-paham keagamaan serta tingginya ego kesukuan 2. Kurangnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat 3. Derasnya arus globalisasi dan teknologi informasi

serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri					yang mengarah pada perubahan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat 4. Lemahnya pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing di daerah 5. Semakin meningkatnya kasus penyakit masyarakat
---	--	--	--	--	---

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025-2029, visi Perangkat Daerah telah selaras dengan visi Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara yaitu :

“Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”

Guna mewujudkan visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2025 – 2029 diatas, maka disusunlah misi yang menjadi tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya. Oleh karena itu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara perwujudan *Misi Kesatu* dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

***“Terbaik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Profesionalisme
Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara”***

Dalam penjabaran misi tersebut Badan Kesbangpol telah menuangkan ke dalam tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

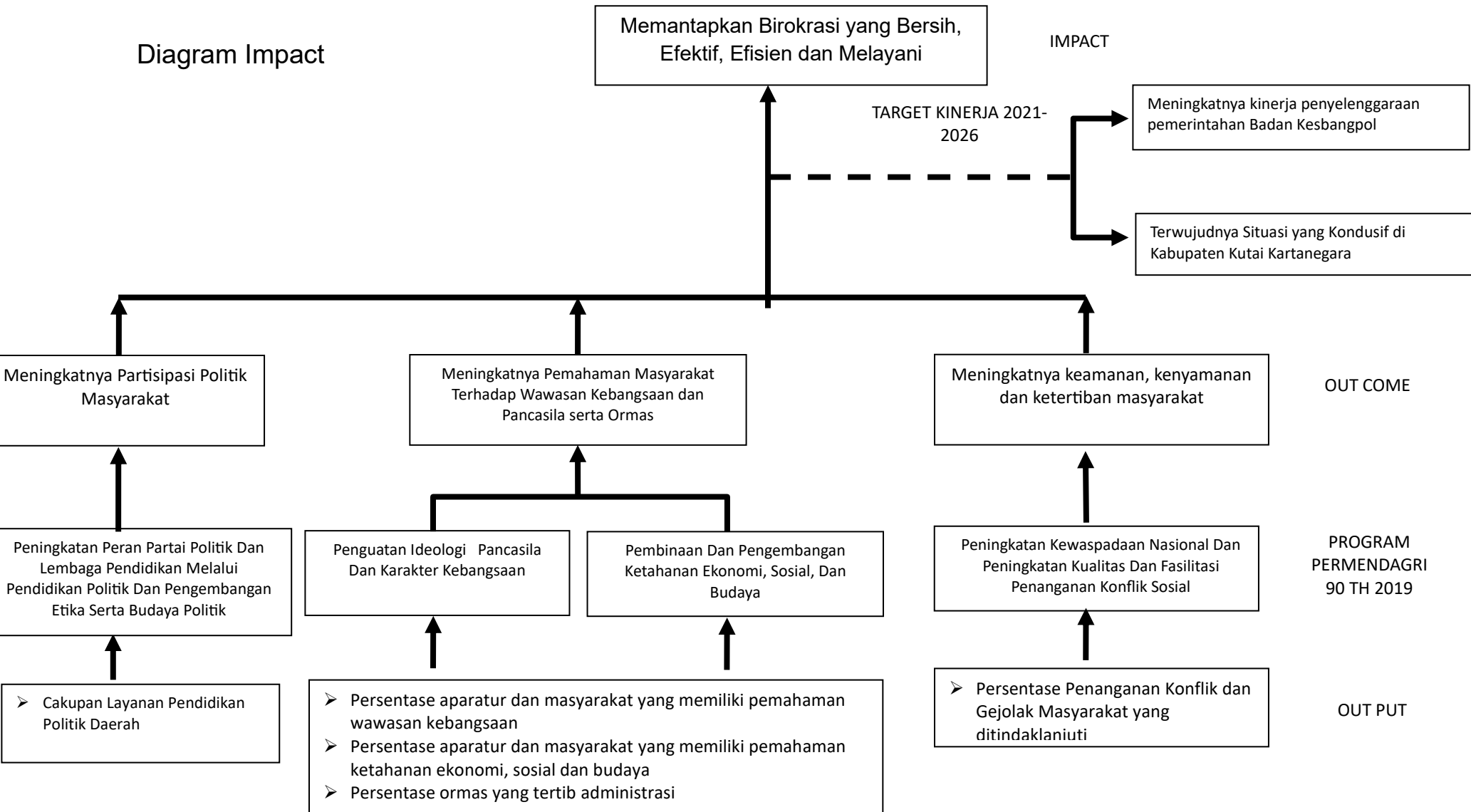
Tabel 3.1
TUJUAN OPD

MISI 1 RPJMD	TUJUAN MISI 1 RPJMD	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN
1. Terbaik Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara.	1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Berlandaskan Demokrasi Substansial dan Stabilitas Kondusivitas Wilayah	1. Terwujudnya Kehidupan Bermasyarakat yang Berlandaskan Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	Indeks Harmoni Indonesia

Tabel 3.2
SASARAN OPD

SASARAN RPJMD	SASARAN OPD	INDIKATOR SASARAN
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT	1. Meningkatnya Wawasan Demokrasi Masyarakat.	Indeks Partisipasi Politik.
	2. Meningkatnya Keamanan dan Kondusivitas Wilayah	Persentase penyelesaian konflik

Diagram Impact



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

Rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2026 mencerminkan rencana kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2025 – 2029. Pada dasarnya rencana kerja tahun 2026 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2026 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuan dan sasarannya.

Dalam rangka mengimplementasikan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara merencanakan beberapa program dan kegiatan serta sub kegiatan baik yang telah ditentukan dalam renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara maupun kegiatan-kegiatan spesifik badan sebagai perwujudan perkembangan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan parameter serta acuan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan serta sub kegiatan dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2026 yang juga merupakan kelanjutan dari indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada periode Renstra Tahun 2025-2029 sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Cara Hitung
1	Meningkatnya Wawasan Demokrasi Masyarakat	Indeks Partisipasi Politik	86,36	Indeks partisipasi politik adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana warga negara terlibat dalam proses politik. Ini mencakup berbagai bentuk partisipasi, seperti pemilu, kegiatan kampanye, diskusi politik, dan advokasi kebijakan
2	Meningkatnya Keamanan dan Kondusivitas Wilayah	Persentase penyelesaian konflik	100	Persentase Penyelesaian Konflik adalah indikator yang mengukur proporsi jumlah kasus konflik yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total jumlah konflik yang terjadi dalam suatu wilayah atau periode tertentu./Jumlah konflik yang diselesaikan dibagi jumlah total konflik yang terjadi

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini dalam rangka pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 – 2029 dan pencapaian target kinerja Badan Kesbangpol sebagaimana yang telah termuat pada Renstra Badan Kesbangpol tahun 2025 – 2029, sehingga pada tahun anggaran 2026 dalam perumusan program dan kegiatan serta sub kegiatan,

terdapat beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan selain adanya program kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun sebelumnya serta ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum tercapai tingkat kinerjanya, disamping program dan kegiatan tersebut telah sesuai dengan Renstra, sebagai berikut :

1. Tertangkapnya terduga jaringan teroris dalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga diperlukan upaya lebih dalam pencegahan dan penanganannya terutama dalam pencegahan munculnya paham radikalisme
2. Masih banyaknya masalah sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan tambang maupun perkebunan, terutama lahan pada lokasi Ibu Kota Nusantara
3. Pencegahan dan penanganan konflik dalam rangka pasca pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024
4. Terdapat kenaikan harga dan kelangkaan barang kebutuhan pokok masyarakat yang berdampak timbulnya gejolak di masyarakat
5. Munculnya berbagai isu aliran kepercayaan dan faham-faham keagamaan yang mengatasnamakan agama yang berdampak pada SARA
6. Kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat tentang wawasan kebangsaan, sehingga kita harus meningkatkan lagi pemahaman terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI, Wawasan Kebangsaan dan semangat bela negara
7. Masih tingginya angka penyakit masyarakat terutama peredaran dan penyalahgunaan Narkoba
8. Penguatan Forum-Forum Bentukan Pemerintah (FKUB, FPK dan FKDM) serta Jejaring Panca Mandala dan organisasi lainnya
9. Walaupun tidak terdapat pemilu pada tahun 2026, Badan Kesbangpol tetap berkomitmen melakukan Pendidikan politik kepada seluruh lapisan Masyarakat.
10. Adanya peraturan baru terhadap pelaksanaan fasilitasi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan pembentukan Duta Pancasila yang dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi terutama dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka diperlukan penyesuaian pada Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara 2021 – 2026 dan Rencana kerja tahunan tahun 2026 dan target kegiatan tahun 2026 banyak mengalami perubahan baik dari jumlah program maupun jenis kegiatannya serta sub kegiatan. Adapun jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026 terdiri dari :

1. Untuk kegiatan generik terdiri dari 1 program, 8 kegiatan dan 29 sub kegiatan
2. Untuk kegiatan non generik terdiri dari 5 program, 5 kegiatan dan 10 sub kegiatan
3. Sehingga seluruhnya berjumlah 6 program, 13 kegiatan dan 39 sub kegiatan

Kemudian penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesbangpol tahun 2026 disesuaikan dengan RKPD tahun 2026 yang memuat program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara, dimana dalam hal tersebut Badan Kesbangpol termasuk sebagai OPD pendukung dalam program prioritas sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etikas serta Budaya Politik

Dari hal tersebut Badan Kesbangpol telah terakomodir ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Kesbangpol untuk perencanaan tahun 2026 yaitu sebagai berikut :

PROGRAM RENJA KESBANGPOL TAHUN 2026

Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Peningkatan upaya pencegahan dan penanganasn konflik dan gejolak di masyarakat	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan
	Peningkatan pelaporan deteksi dini situasi Ipoleksosbudhankam		
	Peningkatan pengawasan terhadap orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing		
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Politik Dalam Negeri	Peningkatan upaya penyuluhan pendidikan politik bagi masyarakat	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik

	Peningkatan pelaporan perkembangan politik di daerah	Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	
	Penguatan kapasitas kelembagaan parpol		
	Peningkatan fasilitasi pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan Pemilu		
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Peningkatan pembinaan tentang wawasan kebangsaan dan pancasila kepada aparatur dan masyarakat	1. Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Peningkatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas	Peningkatan pembinaan tentang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	2. Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi,	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan

		Sosial, Dan Budaya	Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan
	Peningkatan fasilitas pemerintah daerah terhadap pencegahan penyalahgunaan narkotika	3. Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif
	Penguatan kapasitas dan pengawasan organisasi kemasyarakatan		

Dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, tidak terdapat perbedaan dengan rancangan awal RKPD hanya Terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021

Adapun perincian kegiatan tahun 2026 dihubungkan dengan sumber dana dan ekspektasi pembiayaan untuk menjalankan program dan kegiatan serta prakiraan maju rencana maju tahun 2027 adalah sebagai berikut :

TABEL T-C. 33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

N O	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2026				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027	
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMB ER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.01	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		77	11.735.028.605, 00	APBD II		78	10.210.478.285, 00
	8.01.01.2.0 1	Perencanaan Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6 dokume n	400.000.000,00	APBD II		6 dokume n	130.000.000,00
1	8.01.01.2.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggar ong, Panji	3 dokume n	150.000.000,00	APBD II		3 dokume n	50.000.000,00

2	8.01.01.2.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong, Panji	3 laporan	50.000.000,00	APBD II		3 laporan	80.000.000,00
3	8.01.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	1 laporan	100.000.000,00	APBD II		-	-
4	8.01.01.2.0 1.08	PENYELENGGARAAN WALIDATA PENDUKUNG STATISTIK SEKTORAL DAERAH	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Tenggarong, Panji	1 dokumen	50.000.000,00	APBD II		-	-
5	8.01.01.2.0 1.10	PELAKSANAAN FORUM PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN BIDANG URUSAN YANG DIAMPU DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tenggarong, Panji	1 berita acara	50.000.000,00	APBD II		-	-
	8.01.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel		20 laporan	8.926.686.502,00	APBD II		20 laporan	8.652.912.208,00
6	8.01.01.2.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong, Panji	900 orang/bulan	8.761.046.502,00	APBD II		900 orang/bulan	8.517.272.208,00
7	8.01.01.2.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong, Panji	1 laporan	25.000.000,00	APBD II		1 laporan	20.000.000,00

8	8.01.01.2.0 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Tenggar ong, Panji	18 laporan	115.640.000,00	APBD II		18 laporan	115.640.000,00
9	8.01.01.2.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggar ong, Panji	1 dokumen	25.000.000,00	APBD II		-	-
	8.01.01.2.0 3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		3 dokumen	115.800.000,00	APBD II		3 dokumen	40.800.000,00
10	8.01.01.2.0 3.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggar ong, Panji	1 dokumen	25.000.000,00	APBD II		-	-
11	8.01.01.2.0 3.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggar ong, Panji	1 laporan	50.000.000,00	APBD II		-	-
12	8.01.01.2.0 3.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggar ong, Panji	3 laporan	40.800.000,00	APBD II		3 laporan	40.800.000,00
	8.01.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		4 dokumen	50.000.000,00	APBD II		4 dokumen	20.000.000,00
13	8.01.01.2.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Tenggar ong, Panji	143 paket	-	APBD II		-	-

1 4	8.01.01.2.0 5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggar ong, Panji	75 orang	50.000.000,00	APBD II		75 orang	20.000.000,00
	8.01.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6 layanan	790.000.000,00	APBD II		6 layanan	478.383.000,00
1 5	8.01.01.2.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tenggar ong, Panji	4 paket	5.000.000,00	APBD II		4 paket	5.000.000,00
1 6	8.01.01.2.0 6.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggar ong, Panji	29 paket	100.000.000,00	APBD II		29 paket	50.000.000,00
1 7	8.01.01.2.0 6.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggar ong, Panji	38 paket	35.000.000,00	APBD II		38 paket	25.000.000,00
1 8	8.01.01.2.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggar ong, Panji	5 paket	50.000.000,00	APBD II		5 paket	40.000.000,00
1 9	8.01.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 kecamatan dan luar daerah	600 laporan	550.000.000,00	APBD II		225 laporan	308.383.000,00
2 0	8.01.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggar ong, Panji	2500 dokumen	50.000.000,00	APBD II		2500 dokumen	50.000.000,00
	8.01.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100%	100.000.000,00	APBD II		100%	90.000.000,00

2 1	8.01.01.2.0 7.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong, Panji	1 unit	-	APBD II	Kendaraan Dinas Jabatan Esselon II	-	-
2 2	8.01.01.2.0 7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong, Panji	18 unit	100.000.000,00	APBD II	utk peralatan elektronik dan kebutuhan PPID dan sarana kearsipan	10 unit	90.000.000,00
	8.01.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12 bulan	932.542.103,00	APBD II		12 bulan	508.383.077,00
2 3	8.01.01.2.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong, Panji	12 laporan	1.000.000,00	APBD II		12 laporan	1.000.000,00
2 4	8.01.01.2.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong, Panji	12 laporan	224.084.183,00	APBD II	Penambahan untuk pembiayaan rumah sekretariat BNNK dan Forum	12 laporan	126.599.669,00
2 5	8.01.01.2.0 1.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong, Panji	12 laporan	707.457.920,00	APBD II	utk kenaikan BPJS dan penyediaan jasa tenaga kebersihan	12 laporan	380.783.408,00
	8.01.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah		100%	420.000.000,00	APBD II		100%	290.000.000,00

26	8.01.01.2.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tenggarong, Panji	30 unit	70.000.000,00	APBD II		30 unit	80.000.000,00
27	8.01.01.2.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong, Panji	40 unit	110.000.000,00	APBD II		40 unit	110.000.000,00
28	8.01.01.2.0 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Tenggarong, Panji	43 unit	40.000.000,00	APBD II		43 unit	50.000.000,00
29	8.01.01.2.0 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tenggarong, Panji	2 unit	200.000.000,00	APBD II		2 unit	50.000.000,00
	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		3,15%	5.560.000.000,00	APBD II		3,35%	650.000.000,00
	8.01.02.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		12 dokumen	5.560.000.000,00	APBD II		12 dokumen	650.000.000,00
30	8.01.02.2.0 1.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	20 kecamatan	900 orang	5.400.000.000,00	APBD II	Fasilitasi Kegiatan Paskibraka, Fasilitasi FPK, JPM dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Pemuda	500 orang	400.000.000,00

								Pemudi Lintas Suku		
3 1	8.01.02.2.0 1.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	10 kecamatan (Ilo, kulu, sanga, sanga, ma. Jawa, ma. Badak, kota bangun darat, ma. Wis, sebulu, kenohan, samboja barat dan tabang)	200 orang	160.000.000,00	APBD II	Kegiatan Pembentukan Kader Bela Negara di 20 kecamatan dan pembinaan karakter kebangsaan	300 orang	250.000.000,00
	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		6,41%	4.002.304.000,00	APBD II		6,59%	1.802.894.600,00

	8.01.03.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri		12 dokumen	4.002.304.000,00	APBD II		12 dokumen	1.802.894.600,00
3 2	8.01.03.2.0 1.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	1.000 orang	500.000.000,00	APBD II	kegiatan pendidikan politik bagi pemilih pemula, perempuan, komunitas, ormas, aparaturnya desa/kelurahan dan RT	460 orang	250.000.000,00

3 3	8.01.03.2.0 1.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kabupaten Kutai Kartanegara	21 orang	3.352.304.000,00	APBD II	Fasilitas kenaikan nilai per suara Bantuan Keuangan Bagi Partai Politik hasil pemilu tahun 2024	48 orang	1.402.894.600,00
3 4	8.01.03.2.0 1.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	20 kecamatan	20 laporan	150.000.000,00	APBD II	Monitoring pemantauan dan perkembangan politik di daerah	24 laporan	150.000.000,00
	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		23,30%	200.000.000,00	APBD II		28,15%	200.000.000,00
	8.01.04.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitas dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		30 dokumen	200.000.000,00	APBD II		30 dokumen	200.000.000,00

3 5	8.01.04.2.0 1.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	20 kecamatan	200 orang	200.000.000,00	APBD II	Fasilitasi dan Pengawasan Ormas, serta Sosialisasi terhadap Ormas dan pelaksanaan ormas award dan koordinasi di ULA Kemendagri terkait SKT Ormas	90 orang	200.000.000,00
	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan		2,13%	800.000.000,00	APBD II		2,29%	630.000.000,00
	8.01.05.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya		12 dokumen	800.000.000,00	APBD II		12 dokumen	630.000.000,00

3 6	8.01.05.2.0 1.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	870 orang	600.000.000,00	APBD II	Fasilitas FKUB, BNNK, Kemah Pemuda Pemudi Lintas Agama, pelaksanaan assesment pengguna narkotika dan pembelian tes kit narkoba	600 orang	500.000.000,00
3 7	8.01.05.2.0 1.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	20 kecamatan	20 laporan	200.000.000,00	APBD II	Fasilitas Ketahanan Ekonomi untuk sosialisasi pekat di bidang ketahanan ekonomi	18 Laporan	130.000.000,00
	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan		100%	1.250.000.000,00	APBD II		100%	1.900.000.000,00

	8.01.06.2.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		12 dokumen	1.250.000.000,00	APBD II		12 dokumen	1.900.000.000,00
38	8.01.06.2.0 1.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	20 kecamatan	220 orang	250.000.000,00	APBD II	Fasilitasi FKDM, Monitoring TKA, Sosialisasi Radikalisme, Deteksi Dini	300 orang	400.000.000,00
39	8.01.06.2.0 1.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	20 kecamatan	30 dokumen	1.000.000.000,00	APBD II	Fasilitasi Forkopimda dalam penanganan konflik dan gejala masyarakat	50 dokumen	1.500.000.000,00
		JUMLAH				23.547.332.605,00				15.393.372.885,00

BAB V

P E N U T U P

A. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian

Ada beberapa sasaran yang belum mengakomodir kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara secara menyeluruh untuk tahun 2026. Hal ini bukan berarti sasaran tersebut tidak menjadi perhatian namun lebih fokus pada prioritas kegiatan sebagaimana tertera di atas untuk tahun 2026, dalam rangka mensinergikan kegiatan sesuai dengan misi RPJMD 2025 – 2029 khususnya untuk tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Sehingga sasaran yang belum direalisasikan dalam kegiatan 2026 secara bertahap akan dilaksanakan pada tahun ke depan, sesuai dengan pagu dan posting anggaran yang tersedia.

B.Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2026 memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target pembangunan daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2026 yang harus diperhatikan oleh para penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan, antara lain :

1. Seluruh penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan, utamanya program dan kegiatan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi dan sinergitas.
2. Setiap penanggung jawab program dan pelaksana kegiatan wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di Renja Badan Kesbangpol tahun 2026 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan serta mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja perangkat daerah.

3. Kepala Badan, melalui Sekretaris, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pada setiap bidang secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2026
4. Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2026 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2026. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun 2026, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas serta efisiensi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Rencana Tindak Lanjut

Dari rencana program dan kegiatan tersebut diatas, tidak terdapat perbedaan dengan rancangan RKPD hanya Terdapat perbedaan pada satuan di renstra karena menyesuaikan dengan Kepmendagri 050-5889 tahun 2021

Usulan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara, disusun berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang-bidang teknis. Penyempurnaan matrik Renja bertujuan untuk mewujudkan alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target-target kinerja berikut kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan rencana kinerja tahunan adalah *target setting* dari capaian indikator kinerja.

Langkah atau kegiatan utama penyusunan Renja OPD meliputi : 1) Merumuskan kegiatan, 2) Merumuskan indikator kegiatan, 3) menetapkan target setiap indikator kegiatan dengan memperhatikan capaian kinerja tahun sebelumnya.

Penilaian pencapaian target kinerja kegiatan akan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kerangka monitoring dan evaluasi kegiatan akan dikembangkan berdasarkan indikator dan target kinerja.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Kesbangpol Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 ini disampaikan, sebagai acuan dan dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan serta sebagai alat ukur efektivitas pencapaian sasaran pembangunan, efisiensi belanja dan akuntabilitas kinerja pemerintah.

Tenggarong, 1 Agustus 2025

**Kepala Badan Kesbangpol
Kabupaten Kutai Kartanegara,**

RINDA DESIANTI, S.Sos.,M.Si
NIP. 19691226200112 2 002